EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN SOSIAL MODAL USAHA MENJAHIT PADA KOTA BANDA ACEH

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

AHMAD KAMIL
NIM. 210802152

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
TAHUN 2026

EFEKTIFITAS PROGRAM BANTUAN SOSIAL MODAL USAHA MENJAHIT PADA KOTA BANDA ACEH

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Diajukan Oleh:

AHMAD KAMIL
NIM. 210802152

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Said Amirul Kamar, M.M.,M.Si	**Putri Marzaniwa S.A.P., M.P.A**
NIP. 1961105198203100	**NIP. 1998110220244032001**

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG

EFEKTIFITAS PROGRAM BANTUAN SOSIAL MODAL USAHA MENJAHIT PADA KOTA BANDA ACEH

SKRIPSI

Ahmad Kamil
NIM: 210802152

Telah diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada hari / Tanggal : Jum'at, 23 Januari 2025 M
04 Sya'ban 1447 H

Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,	Sekretaris
Dr. Said Amirul Kamar, M.M.,M.Si	**Putri Marzanjar, S.A.P., M.P.A**
NIP. 196110519820310O	NIP. 199811022024403200l
Penguji I,	Penguji II,
Muazzinah, B.Sc., M.P.A	**Mardani Malemi, S. Fil.I., M.A.P**
NIP . 198411252019032012	NIP. 198105052011011004

Mengetahui,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof.Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag
NIP.197403271999031005

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Ahmad Kamil
NIM	: 210802152
Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir	: Banda Aceh, 6 Agustus 2003
Alamat	: Banda Aceh,Lueng bata, Gampong Batoh

Dengan ini menyatakan secara sadar dan penuh tanggung jawab bahwa skripsi yang saya susun merupakan hasil kerja dan pemikiran saya sendiri. Dalam proses penyusunan karya ilmiah ini, saya menyatakan bahwa:

1. Saya tidak mengambil atau meniru gagasan pihak lain tanpa kemampuan untuk mengolah, mengembangkan, serta mempertanggungjawabkannya secara ilmiah.
2. Saya tidak menjiplak atau menyalin karya tulis orang lain dalam bentuk apa pun.
3. Saya tidak menggunakan karya, data, maupun pemikiran pihak lain tanpa mencantumkan sumber rujukan yang sah atau tanpa memperoleh izin dari pemilik karya.
4. Saya tidak melakukan rekayasa, perubahan, maupun pemalsuan terhadap data penelitian.
5. Seluruh isi skripsi ini dikerjakan secara mandiri dan saya siap bertanggung jawab sepenuhnya atas isi dan konsekuensinya.

Apabila di kemudian hari terdapat klaim atau tuntutan dari pihak lain terkait keaslian karya ini, dan setelah dilakukan pembuktian secara akademik terbukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN ArRaniry Banda Aceh.

Banda Aceh, 23 Januari 2026

Yang Menyatakan,

AHMAD KAMIL

NIM. 210802152

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji beserta syukur peneliti panjatkan atas kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-NYA, sehingga Peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul". Selanjutnya, Shalawat berseta salam kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW , yang telah menjadi suri tauladan bagi makhluk seluruh dunia.

Penulisan Skripsi ini yang berjudul **""**. Adapun Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Program S1 Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini penulis menyadari tidak terlepas dari bantuan pengarahan dan bimbingan dari berbagai pihak telah memberikan ide dan meluangkan waktu untuk membantu penulis. Maka, dengan rasa hormat dan pada kesempatan istimewa ini izinkan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Mujiburrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Eka Januar, M.Soc., Sc. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Reza Idria, MA., PhD. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

6. Muazzinah, M.PA. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Dr. Said Amirulkamar, M.M.,M.Si dan Putri Marzaniar, S.A.P., M.P.A. selaku pembimbing yang telah meluangkan waktunya dan tidak pernah bosan-bosan dalam memberikan arahan dan motivasi serta membimbing dan mengarahkan peneliti dengan penuh kesabaran sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintaham yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan.
9. Terima kasih kepada responden yang telah meluangkan waktu mengisi pertanyaan peneliti dan memberikan informasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
10. Bentuk penghormatan dan dedikasi kepada Ayah tercinta, Bapak M Jamil Yusuf, sebagai sosok teladan dan pahlawan dalam kehidupan penulis. Ayah telah banyak mengajarkan arti perjuangan, keteguhan, serta pentingnya selalu mengingat tujuan hidup di tengah berbagai rintangan yang dihadapi. Nasihat, dukungan, dan keteladanan Ayah senantiasa menjadi sumber inspirasi dan pedoman bagi penulis dalam menapaki setiap langkah kehidupan.
11. Pintu surgaku sekaligus rumah untukku berpulang, Ibunda tercinta Siti Maimunah, yang selalu menjadi penyemangat penulis dan menjadi sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memeberikan motivasi yang luar biasa. Terimakasih untuk doa-doa yang selalu diberikan untuk penulis, terimakasih selalu berjuang untuk penulis, berkat doa serta dukungannya sehingga penulis bisa berada dititik ini. Sehat selalu dan Panjang umur, karena ibu harus selalu ada disetiap perjuangan dan pencapaian hidup penulis.

12. Kepada saudara-saudari penulis.Terimakasih telah memberi dukungan, semangat dan motivasi selama ini,serta do'a yang terbaik untuk penulis.
13. Kepada sahabat sekaligus teman seperjuangan penulis, TM Fajar Ramadan, Nailul Authat, Terima kasih telah tertawa, menemani,mendengar keluh kesah penulis selama menyelesaikan skripsi, dan meluangkan waktu untuk bercengkrama di tengah sibuknya kegiatan kalian dan riuhnya dinamika kehidupan. Semoga kalian selalu diberi kebahagiaan dimanapun kalian berada.

Peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar menjadi pembelajaran bersama. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bisa berguna dan bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Banda Aceh, 3 Januari 2026
Penulis,

Ahmad Kamil

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas program bantuan sosial modal usaha menjahit di Kota Banda Aceh. Program bantuan tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberdayakan masyarakat miskin melalui pemberian bantuan peralatan usaha menjahit guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian berjumlah tujuh orang yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, terdiri atas pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh dan penerima bantuan usaha menjahit di Gampong Lamglumpang dan Lamteh, Kecamatan Ulee Kareng. Analisis efektivitas program menggunakan lima kriteria evaluasi kebijakan publik William N. Dunn, yaitu efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program bantuan sosial modal usaha menjahit di Kota Banda Aceh belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Dari aspek efisiensi, mekanisme penyaluran bantuan telah dilaksanakan sesuai ketentuan, tetapi hasil yang dicapai belum maksimal. Dari aspek kecukupan, bantuan berupa peralatan menjahit belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan penerima karena tidak disertai modal kerja, pelatihan keterampilan, dan pendampingan berkelanjutan. Sementara itu, aspek perataan, responsivitas, dan ketepatan menunjukkan bahwa program telah memiliki tujuan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat miskin, tetapi pelaksanaannya masih memerlukan perbaikan. Dengan demikian, efektivitas program masih perlu ditingkatkan melalui penguatan pendampingan, pelatihan, dukungan modal kerja, serta monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan agar manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh penerima bantuan.

Kata Kunci: Efektivitas Program, Bantuan Sosial, Modal Usaha, Menjahit, William N. Dunn.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Banda Aceh, sebagai ibukota Provinsi Aceh, menghadapi beberapa tantangan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, salah satunya adalah kemiskinan dan kurangnya lapangan pekerjaan [1]. Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah Aceh telah menerapkan berbagai program bantuan sosial, dengan salah satu fokus utamanya adalah pengembangan usaha menjahit. Pelaksanaan program bantuan sosial di Kota Banda Aceh, diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menjadi landasan utama[2], sementara Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial memberikan panduan lebih rinci mengenai pelaksanaan program-program kesejahteraan sosial [3], termasuk bantuan untuk usaha ekonomi produktif. Di tingkat daerah, Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial juga menjadi dasar hukum pelaksanaan program bantuan sosial di Provinsi Aceh, termasuk Kota Banda Aceh. Kerangka kejadian ini memberikan landasan bagi

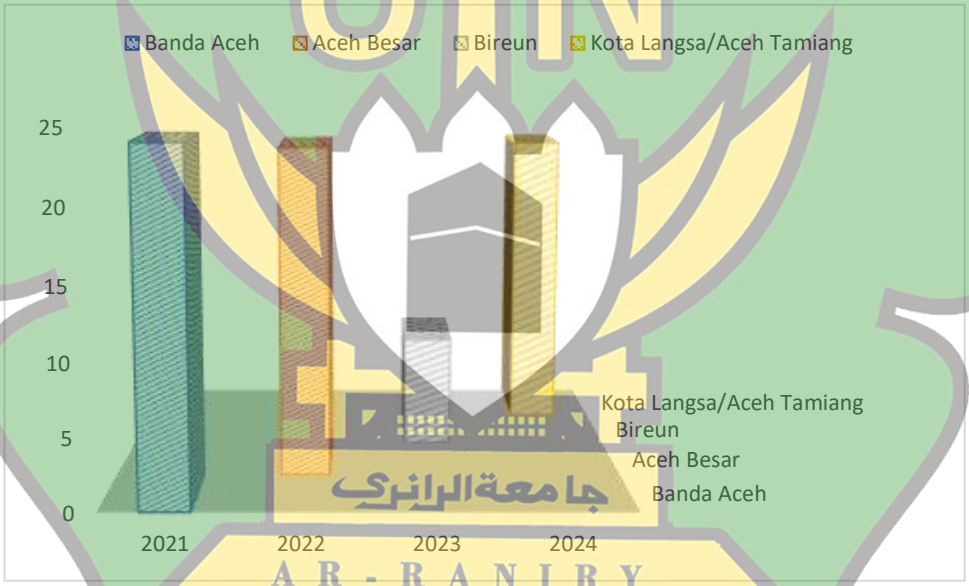
[1] Suci Frisnoiry et al., "Analisis Permasalahan Pengangguran Di Indonesia," *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi* 17, no. 1 (2024): 366–75.

[2] Amanda RIOS, "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL D" 4, no. 2 (2009): 1–15, http://www.albayan.ae.

[3] PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, "PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL," *Skripsi Universitas Negeri Malang* 39, no. 1 (2012): 1–15,

pemerintah Aceh untuk merancang dan mengimplementasikan program bantuan sosial, sekaligus membuka ruang untuk inovasi dalam pelaksanaannya.

Usaha menjahit dipilih sebagai salah satu sektor prioritas karena dianggap memiliki potensi besar untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian masyarakat[4]. Kebutuhan akan pakaian dan produk tekstil yang terus ada membuat usaha ini memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan. Selain itu, keterampilan menjahit relatif mudah dipelajari dan dapat dilakukan dari rumah, sehingga cocok untuk berbagai kelompok masyarakat, termasuk ibu rumah tangga dan penyandang disabilitas.



Sumber: (Dinas Sosial Aceh)

[4] Andini, "POTENSI USAHA PENJAHIT PAKAIAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA (STUDI PADA USAHA MENJAHIT DI 38B BANJAR REJO BATANGHARI LAMPUNG TIMUR)" 4, no. 02 (2024): 7823–30.

Program bantuan sosial modal usaha menjahit di Kota Banda Aceh secara umum diberikan dalam bentuk barang, bukan uang tunai, dengan fokus utama pada pemberian peralatan usaha menjahit seperti mesin jahit serbaguna, mesin obras, dan mesin sirsak. Bantuan ini disalurkan langsung ke sejumlah kelompok usaha di berbagai gampong.

Tabel 1.1

Waktu Penyaluran	Kecamatan	Gampong	Jumlah Anggota (Orang)
Juli 2020	Ulee Kareng	Lamglumpang	6
Juli 2020	Ulee Kareng	Lamteh	15
Juli 2020	Ulee Kareng	Pango Deah	4
Oktober 2020	Meuraxa		8
Oktober 2020	Meuraxa		7
Oktober 2020	Kuta Raja		5
Oktober 2020	Banda Raya		24
Total			**69**

Sumber : Disnaker Kota Banda Aceh[5]. [1]

Secara nasional, penentuan masyarakat miskin atau kurang mampu sebagai penerima bantuan sosial di Indonesia didasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial RI melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021[6]. DTKS merupakan data induk yang berisi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

[5] "Disnaker Serahkan Bantuan 44 Mesin Jahit Untuk Kelompok Usaha Di Banda Aceh," .

[6] Ezra Viranny Manoppo and Nandika Aditya Laoh, "Strategi Pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dalam Penyaluran Bantuan Sosial RS-RTLH Oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara," *Jurnal Konstituen* 4, no. 1 (2022): 25–39.

Kriteria DTKS mengacu pada 14 indikator kemiskinan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yang meliputi kondisi fisik tempat tinggal (luas lantai, jenis lantai dan dinding), akses fasilitas dasar (MCK, listrik, air minum), pola konsumsi keluarga, akses kesehatan dan pendidikan, serta sumber penghasilan kepala rumah tangga [7].

Khusus di Provinsi Aceh, pengelolaan data penduduk miskin terus disempurnakan melalui pemutakhiran DTKS secara dinamis sejak tahun 2020, tidak hanya untuk data yang telah ada dalam DTKS, tetapi juga untuk masyarakat yang layak mendapatkan bantuan namun belum terdata, dengan melibatkan pemerintah kabupaten/kota yang aktif melakukan verifikasi dan validasi DTKS demi memperbaiki data penduduk miskin dan rentan di daerah masing-masing.

Program bantuan modal usaha menjahit di Kota Banda Aceh menargetkan kelompok masyarakat yang terdaftar dalam DTKS dengan kategori mampu mengembangkan usaha produktif, yakni keluarga prasejahtera yang masih memiliki potensi untuk diberdayakan melalui bantuan peralatan jahit dan pelatihan keterampilan, dengan syarat tambahan berupa kesiapan membentuk kelompok usaha dan komitmen mengikuti program pendampingan pasca penyaluran bantuan[8].

Seluruh proses penyaluran dilakukan dengan pengawasan ketat, termasuk larangan memperjualbelikan alat bantuan serta monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan pemanfaatan optimal. Dengan pola penyaluran berbasis

[7] Muhamad Fahrul Mustofa and Tris Utomo, "Standar Kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) Perspektif Dr. Wahbah Zuhaili," *Wasathiyyah* 5, no. 1 (2023): 1–17.

[8] "Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan," n.d., https://dpmg.bandaacehkota.go.id/2010/10/20/program-percepatan-penanggulangan-kemiskinan/.

kelompok dan gampong serta fokus bantuan yang tepat sasaran, program ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pelaku usaha mikro di bidang jahit-menjahit, membuka lapangan kerja baru, serta mengurangi angka kemiskinan di Kota Banda Aceh.

Pemerintah Kota Banda Aceh juga berupaya melibatkan pihak swasta dalam pengembangan usaha menjahit ini, seperti penjajakan kerjasama dengan PLN melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) . Inisiatif ini menunjukkan upaya pemerintah Kota Banda Aceh untuk mencari sumber daya tambahan dalam mendukung program bantuan sosial.

[2]Meskipun berbagai program telah dilaksanakan, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Pertama, masalah keberlanjutan usaha setelah bantuan diberikan, dimana banyak usaha kecil *struggle* untuk bertahan dalam jangka panjang karena kesulitan dalam pemasaran produk atau manajemen keuangan. Kedua, jangkauan program yang masih terbatas dan belum mampu menjangkau seluruh kelompok sasaran. Ketiga, koordinasi antar lembaga pemerintah kota Banda Aceh dan dengan pihak swasta yang seringkali kurang optimal, sehingga hasil program kurang maksimal.

Penanggung jawab utama program bantuan modal usaha dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh adalah Kepala Dinas Sosial sendiri, yang berkoordinasi erat dengan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Banda Aceh[9]. Dalam pelaksanaannya, dibentuk tim khusus yang terdiri dari

[9] Diskominfo.bandaacehkota, "Disnaker Serahkan Bantuan Mesin Jahit Untuk Dorong Kelompok Usaha Masyarakat Di Banda Aceh."

berbagai elemen, termasuk pejabat Dinsos, akademisi, dan tokoh masyarakat, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas program. Jumlah modal usaha yang diberikan bervariasi, umumnya berkisar antara Rp 5 juta hingga Rp 25 juta per penerima, tergantung pada jenis usaha dan hasil evaluasi tim seleksi. besaran ini ditentukan berdasarkan analisis kebutuhan dan potensi keberhasilan usaha yang diajukan. Sasaran utama program ini adalah masyarakat prasejahtera atau keluarga miskin yang memiliki potensi untuk mengembangkan usaha[10].

Pengelolaan dana bantuan usaha yang diberikan oleh Dinas Sosial kepada masyarakat Kota Banda Aceh telah memberikan dampak yang terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat. Program ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat ekonomi lemah dengan memberikan modal usaha serta pelatihan keterampilan yang diperlukan. Hasilnya, banyak penerima bantuan berhasil mengembangkan usaha kecil dan menengah yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan pendapatan keluarga mereka. Dampak positif ini tidak hanya dirasakan oleh penerima bantuan secara langsung, tetapi juga memiliki efek pada ekonomi lokal secara keseluruhan, telah mendorong pertumbuhan [11].

Namun, tantangan dalam pengelolaan dana bantuan ini juga perlu diperhatikan, seperti memastikan pemerataan distribusi, mencegah penyalahgunaan dana, serta memberikan pendampingan berkelanjutan agar usaha yang dirintis dapat

[10] aceh journal national Network, "Dinsos Aceh Salurkan Modal Usaha Dampak Kenaikan Bbm," *Aceh Journal Natonal Network*, September 2022, https://www.ajnn.net/.

[11] M.T Gusmeri, "Efektifitas Dana Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Acehkerjasamabadan Perencanaan Pembangunandaerahdenganfakultas Ekonomi Dan Bisnis Islamuniversitas Islam Negeri (Uin) Ar-Ranirytahun 2019laporanbappeda," 2019.

bertahan dan berkembang dalam jangka panjang. Meski demikian, secara keseluruhan, dampak positif dari program ini telah memberikan kontribusi yang berarti dalam upaya pemulihan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Banda Aceh pasca berbagai tantangan yang dihadapi kota ini.

Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena Program bantuan sosial ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, khususnya kelompok usaha menjahit, dengan menyediakan modal dan fasilitas yang diperlukan. Maka dengan adanya dukungan ini, diharapkan usaha menjahit dapat berkembang, meningkatkan pendapatan, dan menciptakan lapangan kerja baru, yang pada gilirannya dapat mengurangi tingkat pengangguran di daerah tersebut dapat bantuan modal usaha menjahit di kota Banda Aceh.

1.2 Identifikasi Masalah[3]

1. Keberlanjutan usaha menjahit setelah bantuan diberikan masih menjadi tantangan, dimana banyak usaha kecil mengalami kesulitan untuk bertahan dalam jangka panjang karena masalah pemasaran produk dan manajemen keuangan.
2. Jangkauan program bantuan sosial untuk usaha menjahit masih terbatas dan belum mampu menjangkau seluruh kelompok sasaran di Kota Banda Aceh.

1.3 Rumusan Penelitian

1. Bagaimana efektivitas program bantuan modal usaha menjahit di Kota Banda Aceh berdasarkan kriteria evaluasi kebijakan William Dunn?

جامعة الرانري
AR-RANIRY

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas modal usaha menjahit di Kota Banda Aceh berdasarkan kriteria evaluasi kebijakan William Dunn?

1.5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Berkontribusi pada pengembangan teori pemberdayaan masyarakat dalam konteks program bantuan sosial untuk usaha kecil. Memberikan wawasan baru tentang inovasi dalam penyelenggaraan program bantuan sosial dari perspektif administrasi publik.

2. Manfaat Praktis

Membantu Pemerintah Kota Banda Aceh merumuskan kebijakan dan program bantuan sosial yang lebih efektif untuk usaha menjahit. Memberikan panduan praktis bagi pelaku usaha menjahit dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha mereka.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB II

Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Tahun Terbit	Kerangka Konseptual	Metode penelitian	Teknik analisis data	Hasil Penelitian	Gap Penelitian
1.	[12]**Palupi Lindiasari Samputra (2017)**	Kerangka konseptual dari jurnal ini berfokus pada analisis hubungan antara berbagai program bantuan sosial dan faktor ekonomi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia.	Pendekatan non-parametrik Analisis statistik untuk menguji hubungan antara variabel-variabel	Jurnal ini menggunakan teknik analisis data dengan pendekatan kuantitatif dan statistik non-parametrik. Uji korelasi yang digunakan adalah Uji Pearson Product Moment dan Uji Rank-Spearman, dengan alat statistik SPSS 23	Hasil Penelitian ini menemukan bahwa program bantuan sosial seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-PBI), Beras Sejahtera (Rastra), dan Program Keluarga Harapan (PKH)..	**E:** Penelitian El-Hendawy dkk. dilakukan di Indonesia secara nasional dengan menganalisis program bantuan sosial seperti JKN-PBI, Rastra, dan PKH, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh dengan fokus pada program bantuan modal usaha menjahit dari Dinas Sosial. **T:** Penelitian El-Hendawy dkk. menggunakan teori ekonomi elastisitas dengan pendekatan kuantitatif non-parametrik, sedangkan penelitian ini menggunakan teori efektivitas kebijakan William Dunn dengan pendekatan kualitatif. **P:** Penelitian El-Hendawy dkk. fokus pada efektivitas berbagai program bantuan sosial nasional dalam mengurangi kemiskinan secara makro, sedangkan penelitian ini fokus pada efektivitas satu program bantuan modal usaha menjahit di tingkat pemerintah daerah.

[12] Palupi Lindiasari Samputra and Aji Wahyu Ramadhani, "Efektifitas Bantuan Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Tengah Perlambatan Ekonomi Indonesia Dengan Pendekatan Non-Parametrik," *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec* 5, no. 1 (2019): 9–31.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

2.	**[13]Auriza Musfirahwaty dan Wahyuni sakka(2024)**	Kerangka Konseptual Jurnal ini membahas inisiatif pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk mengatasi tantangan pemasaran dan operasional yang dihadapi oleh usaha jahit "Ikayani" di Watangpulu, Sidrap, Indonesia	• Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	Teknik analisis data yang digunakan dalam jurnal tersebut melibatkan pengumpulan semua informasi, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan	Hasil penelitian dari jurnal ini menunjukkan bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Raharja berhasil melaksanakan berbagai program pendidikan dan keterampilan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat miskin.	**E:** Penelitian Musfirahwaty dan Sakka dilakukan di Watang Pulu, Sidrap pada usaha jahit "Ikayani" yang sudah berjalan, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh pada kelompok usaha penerima bantuan baru dari pemerintah daerah. **T:** Penelitian Musfirahwaty dan Sakka menggunakan teori inovasi dan orientasi kewirausahaan untuk pendampingan UMKM, sedangkan penelitian ini menggunakan teori efektivitas kebijakan William Dunn untuk evaluasi program pemerintah. **P:** Penelitian Musfirahwaty dan Sakka fokus pada pendampingan manajemen usaha dan peningkatan efisiensi operasional UMKM yang sudah eksis, sedangkan penelitian ini fokus pada evaluasi efektivitas program bantuan pemerintah untuk mengembangkan usaha baru. ,
3.	**[14]Aceng Ibrahim dan**	Kerangka konseptual dari	• Metode penelitian	Teknik analisis data yang digunakan dalam	Teknik analisis data yang	**E:** Penelitian Ibrahim dan Dewi dilakukan melalui PKBM Raharja dengan berbagai program

[13] Auriza Musfirahwaty, Wahyuni Sakka, and Sri Ramdayani, "Inovasi Dan Kreativitas: Pendampingan Manajemen Usaha Penjahit Ikayani Innovation and Creativity: Business Management Assistance for Ikayani Tailoring," *CERGAS: Journal of Community Empowerment Research and Global Action Studies* 1, no. 1 (2025): 26–34.

[14] Aceng Ibrahim, Bachrun Rifa'i, And Ratna Dewi, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui PKBM Untuk Meningkatkan Keterampilan Masyarakat Miskin," *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 5, No. 4 (2023): 475–96, Https://Doi.Org/10.15575/Tamkin.V5i4.23925.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

	Ratna dewi (2023)	jurnal ini berfokus pada peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam pemberdayaan masyarakat melalui program pendidikan dan ekonomi.	yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	jurnal tersebut melibatkan pengumpulan semua informasi, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan	digunakan dalam jurnal tersebut melibatkan pengumpulan semua informasi, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan	keterampilan (menjahit, memasak, komputer), sedangkan penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh dengan fokus khusus pada satu program bantuan modal usaha menjahit. **T:** Penelitian Ibrahim dan Dewi menggunakan teori pemberdayaan yang melibatkan enabling, empowering, dan kemandirian, sedangkan penelitian ini menggunakan teori efektivitas kebijakan William Dunn dengan lima indikator evaluasi. **P:** Penelitian Ibrahim dan Dewi fokus pada berbagai program PKBM dalam meningkatkan keterampilan masyarakat miskin secara umum, sedangkan penelitian ini fokus secara spesifik pada evaluasi program bantuan modal usaha menjahit dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh.
4.	[15]**Nurul Fadhillah dan Fitriana(2021)**	Kerangka konseptual Penelitian ini mengevaluasi efektivitas pelatihan menjahit bordir yang	• metode kualitatif deskriptif,	Data Reduction (Reduksi Data), Data Display (Penyajian Data), Conclusion Drawing/Verification (Penarikan	Penelitian ini mengevaluasi efektivitas pelatihan menjahit bordir yang diselenggarakan oleh Dekranasda	**E**: Penelitian Fadhillah dan Fitriana dilakukan di Kota Banda Aceh pada masa pandemi Covid-19 dengan fokus pada pelatihan menjahit bordir oleh Dekranasda, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh pada kondisi pasca-pandemi dengan fokus pada bantuan modal usaha oleh Dinas Sosial.

[15] Nurul Fadhillah and Rosmala Dewi, "EFEKTIVITAS PELATIHAN MENJAHIT BORDIR PADA DEKRANASDA KOTA BANDA ACEH UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI KELUARGA DI MASA PANDEMI," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kesejahteraan Keluarga* 7, no. 3 (2022): 11–18.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

		diselenggarakan oleh Dekranasda Kota Banda Aceh dalam meningkatkan ekonomi keluarga di masa pandemi Covid-19.		Kesimpulan dan Verifikasi),	Kota Banda Aceh dalam meningkatkan ekonomi keluarga di masa pandemi Covid-19. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini melibatkan lima responden yang telah mengikuti pelatihan dan membuka usaha border.	**T:** Penelitian Fadhillah dan Fitriana menggunakan teori analisis data dari Sugiyono (reduksi, display, verifikasi), sedangkan penelitian ini menggunakan teori efektivitas kebijakan William Dunn dengan lima indikator evaluasi kebijakan publik. **P:** Penelitian Fadhillah dan Fitriana fokus pada evaluasi efektivitas pelatihan keterampilan menjahit bordir dalam meningkatkan ekonomi keluarga di masa krisis, sedangkan penelitian ini fokus pada evaluasi bantuan modal usaha dalam memberdayakan masyarakat miskin secara berkelanjutan. .
5	**Uliatun Hasanah (2022)**[16]	Konsep pembahasan penelitian ini adalah tentang pelatihan kewirausahaan	Metode penelitian kualitatif	reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan	pelatihan menjahit di desa-desa, khususnya untuk ibu-ibu PKK, diterima dengan baik oleh	**E:** Penelitian Ismuhadi dilakukan di desa-desa Lhokseumawe dengan sasaran ibu-ibu PKK melalui program pelatihan kewirausahaan, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh dengan sasaran masyarakat miskin melalui program bantuan modal usaha dari pemerintah daerah.

[16] Uliatun Hasanah, "Pelatihan Kewirausahaan Keterampilan Menjahit Bagi Ibu-Ibu PKK," *PASAI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2022): 19–24.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

		keterampilan menjahit yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, khususnya ibu-ibu PKK, agar dapat meningkatkan kemampuan kerja dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian keluarga dan masyarakat			peserta yang menunjukkan antusiasme dan berhasil mempelajari teknik menjahit yang esensial.	**T:** Penelitian Ismuhadi menggunakan teori kewirausahaan dalam konteks pelatihan pemberdayaan perempuan, sedangkan penelitian ini menggunakan teori efektivitas kebijakan William Dunn untuk menganalisis implementasi program bantuan sosial pemerintah. **P:** Penelitian Ismuhadi fokus pada pelatihan kewirausahaan keterampilan menjahit untuk memberdayakan ibu-ibu PKK, sedangkan penelitian ini fokus pada evaluasi efektivitas program bantuan modal usaha menjahit dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat miskin di Kota Banda Aceh.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Novelty Penelitian

Secara teoritis, dari kelima jurnal tersebut, tidak ada yang menggunakan teori yang sama dengan penelitian ini. Kemudian, secara empiris, terdapat tiga jurnal yang meneliti tempat dan tahun penelitian yang berbeda, sedangkan dua jurnal lainnya memiliki tempat penelitian yang sama tetapi waktu yang berbeda dengan penelitian ini. Sementara itu, secara pengetahuan, fokus dari kelima jurnal tersebut memiliki perbedaan, di mana penelitian ini berfokus pada efektivitas program bantuan modal usaha menjahit di Kota Banda Aceh, sedangkan lima penelitian lainnya berfokus pada: (1) Fokus penelitian pada jurnal ini adalah menganalisis efektivitas program bantuan sosial dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia. (2) Fokus penelitian dari jurnal ini adalah pendampingan usaha bagi UMKM untuk memberdayakan ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing. (3) Fokus penelitian pada jurnal ini adalah upaya, program, dan dampak Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Raharja dalam meningkatkan keterampilan dan kesejahteraan masyarakat miskin melalui berbagai program pendidikan dan keterampilan seperti pelatihan menjahit, memasak, dan komputer. (4) Fokus penelitian dari jurnal ini adalah mengevaluasi efektivitas pelatihan menjahit bordir yang diselenggarakan oleh Dekranasda Kota

Banda Aceh dalam meningkatkan ekonomi keluarga di masa pandemi Covid-19. (5) Pelatihan kewirausahaan keterampilan menjahit untuk memberdayakan wanita, khususnya ibu-ibu dalam PKK (Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) di Lhokseumawe, Aceh.

2.2. Teori Efektivitas Program

2.2.1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas merupakan konsep penting dalam evaluasi program dan kebijakan publik yang mengacu pada tingkat keberhasilan suatu organisasi atau program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Steers , efektivitas adalah "tingkat pencapaian suatu organisasi atas tujuan jangka pendek (tujuan) dan jangka panjang (cara)." Dengan kata lain, efektivitas mengukur sejauh mana output yang dihasilkan sesuai dengan tujuan yang direncanakan[17].

Sementara itu, Siagian mendefinisikan efektivitas sebagai "pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa dengan mutu tertentu tepat pada waktunya." Definisi ini menekankan bahwa efektivitas tidak hanya berkaitan dengan pencapaian tujuan semata, tetapi juga mempertimbangkan penggunaan sumber daya, ketepatan waktu, dan kualitas hasil yang diperoleh[18].

Dalam konteks program bantuan sosial, efektivitas dapat diartikan sebagai kemampuan program dalam memberikan manfaat nyata kepada kelompok sasaran

[17] Richard M. Steers, *Organizational Effectiveness: A Behavioral View* (Santa Monica: Goodyear Publishing, 1977)

[18] Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001)

sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Efektivitas program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat atau besaran anggaran yang dikeluarkan, tetapi lebih kepada dampak riil yang dirasakan oleh masyarakat dan keberlanjutan manfaat tersebut dalam jangka panjang.

2.2.2. Pendekatan Pengukuran Efektivitas

Steers mengembangkan empat pendekatan dalam mengukur efektivitas organisasi atau program, yang kemudian banyak diadopsi dalam evaluasi kebijakan publik. Keempat pendekatan tersebut adalah[19]:

a. Pendekatan Pencapaian Tujuan (*Goal Attainment Approach*)

Pendekatan ini memandang efektivitas dari sudut pandang pencapaian tujuan akhir (ends) yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu program dianggap efektif apabila berhasil mencapai tujuan-tujuan yang telah dirumuskan. Dalam konteks program bantuan modal usaha menjahit, pendekatan ini akan mengukur apakah program berhasil meningkatkan kesejahteraan penerima, membuka lapangan kerja, dan mengembangkan usaha produktif sebagaimana yang menjadi tujuan program.

b. Pendekatan Sumber Daya Sistem (*System Resource Approach*)

Pendekatan ini menekankan pada kemampuan program dalam memperoleh sumber daya yang dibutuhkan dan memanfaatkannya secara optimal. Efektivitas dinilai dari seberapa baik program dapat mengakses dan menggunakan sumber daya

[19] Steers, R. M. (1977). *Organizational effectiveness: A behavioral analysis*. Goodyear Publishing.

seperti anggaran, personel, peralatan, dan informasi. Dalam program bantuan modal usaha, ini mencakup kecukupan anggaran yang dialokasikan, kualitas peralatan yang diberikan, dan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program.

c. Pendekatan Proses Internal (*Internal Process Approach*)

Pendekatan ini fokus pada proses dan mekanisme internal dalam pelaksanaan program. Efektivitas diukur dari kelancaran proses operasional, koordinasi antar unit, komunikasi internal, dan sistem kerja yang ada. Suatu program dianggap efektif jika memiliki proses internal yang baik, seperti mekanisme seleksi penerima yang transparan, penyaluran bantuan yang tepat waktu, serta sistem monitoring dan evaluasi yang berfungsi dengan baik.

d. Pendekatan Kepentingan Strategis (*Strategic Constituencies Approach*)

Pendekatan ini mengukur efektivitas berdasarkan tingkat kepuasan berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap program (stakeholders). Dalam program bantuan sosial, stakeholders meliputi penerima manfaat, pemerintah daerah, pelaksana program, dan masyarakat luas. Program dianggap efektif apabila mampu memenuhi harapan dan kebutuhan berbagai pihak tersebut secara seimbang.

AR-RANIRY

2.2.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas

Menurut Siagian, terdapat delapan faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas suatu program atau organisasi[20], yaitu:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai

   Tujuan program harus dirumuskan dengan jelas, terukur, dan dapat dicapai sehingga menjadi pedoman dalam pelaksanaan.

2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan

   Strategi dan langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan harus ditetapkan dengan baik.

3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap

   Kebijakan harus dirumuskan berdasarkan analisis mendalam terhadap masalah dan kebutuhan yang ada.

4. Perencanaan yang matang

   Program memerlukan perencanaan yang komprehensif mencakup aspek teknis, anggaran, dan sumber daya manusia.

5. Penyusunan program yang tepat

   Program harus dirancang sesuai dengan kondisi dan karakteristik kelompok sasaran.

6. Tersedianya sarana dan prasarana

   Keberhasilan program didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.

[20] Jumiati Sri Yuni Hartika1, "EFEKTIVITAS PROGRAM SLRT MELALUI PELAYANAN MOBIL KELILING OLEH DINAS SOSIAL KABUPATEN PASAMAN" 2, no. 2 (2020): 116–27.

7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien

Implementasi program harus dilakukan dengan tepat waktu, tepat sasaran, dan penggunaan sumber daya yang optimal.

8. Sistem pengawasan dan pengendalian

Diperlukan mekanisme monitoring dan evaluasi untuk memastikan program berjalan sesuai rencana dan melakukan perbaikan jika diperlukan.

2.2.4. Hubungan Teori Efektivitas dengan Kriteria Evaluasi Dunn

Dalam konteks evaluasi kebijakan publik, konsep efektivitas yang dikemukakan oleh Steers dan Siagian memiliki keterkaitan erat dengan kriteria evaluasi yang dikembangkan oleh William N. Dunn. Jika teori efektivitas memberikan kerangka konseptual mengenai apa yang dimaksud dengan efektivitas dan bagaimana mengukurnya secara umum, maka kriteria evaluasi Dunn memberikan dimensi-dimensi operasional yang lebih spesifik untuk mengukur efektivitas dalam konteks kebijakan publik.

Dunn mengidentifikasi lima kriteria utama untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan publik, yaitu efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Kelima kriteria ini secara bersama-sama memberikan gambaran komprehensif tentang tingkat keberhasilan suatu program atau kebijakan. Kriteria efisiensi berkaitan dengan pendekatan sumber daya sistem, kecukupan dan ketepatan terkait dengan pencapaian tujuan, perataan dan responsivitas berhubungan dengan

kepentingan strategis stakeholders, sementara keseluruhan kriteria mencerminkan kualitas proses internal program[21].

Dalam penelitian ini, teori efektivitas dari Steers dan Siagian digunakan sebagai landasan konseptual untuk memahami makna efektivitas secara menyeluruh, sementara kriteria evaluasi Dunn digunakan sebagai kerangka operasional untuk mengukur efektivitas program bantuan modal usaha menjahit di Kota Banda Aceh. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melakukan evaluasi yang komprehensif, tidak hanya melihat pencapaian tujuan program, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek penting lainnya seperti penggunaan sumber daya, pemerataan manfaat, dan kepuasan stakeholders.

2.2.5 Kriteria Evaluasi Efektivitas Kebijakan Publik

Efektivitas kebijakan publik merupakan konsep multidimensi yang tidak dapat diukur hanya dari satu aspek saja. William N. Dunn mengembangkan kerangka evaluasi kebijakan yang komprehensif untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu program atau kebijakan. Menurut Dunn, evaluasi efektivitas kebijakan harus mempertimbangkan berbagai kriteria yang saling berkaitan, yaitu efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Kelima kriteria ini secara bersama-sama memberikan gambaran menyeluruh tentang sejauh mana suatu kebijakan mencapai tujuannya dan memberikan manfaat kepada masyarakat[22]. Dalam penelitian ini, kelima kriteria evaluasi Dunn tersebut digunakan sebagai kerangka analisis untuk mengukur efektivitas program bantuan modal usaha menjahit di Kota

[21] William N. Dunn, *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*, 6th ed. (New York: Routledge, 2017),

[22] William N. Dunn, *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*, edisi ke-4 (Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 2003)

Banda Aceh., yakni:

2.2.1. Efisiensi

William N. Dunn berpendapat bahwa efisiensi (*efficiency*) berkaitan dengan jumlah usaha yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi adalah kemampuan untuk mencapai tujuan kebijakan public melalui penggunaan kekuatan yang tersedia secara efisien untuk mencapai tujuan terbaik berdasarkan usaha atau biaya yang paling sedikit.

2.2.2. Kecukupan

Kecukupan melibatkan melihat atau memprediksi berbagai pilihan yang tersedia yang dapat memenuhi kebutuhan, nilai, atau peluang untuk memecahkan masalah yang muncul.

2.2.3. Perataan

Perataan adalah keadilan yang diperoleh dan diberikan kepada sasaran kebijakan publik terkait erat dengan rasionalitas legal dan sosial. Keadilan ini mengacu pada distribusi dampak dan usaha di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Dengan kata lain, pemeringkatan di sini mengacu pada sejauh mana kebijakan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dibenarkan kaitannya dengan tujuan kebijakan publik.

2.2.4. Responsivitas

Responsivitas merupakan respon tujuan kebijakan publik terhadap implementasi kebijakan. Menurut William N. Dunn, responsivitas (*responsiveness*) berkaitan dengan sejauh mana suatu kebijakan mampu memenuhi kebutuhan,

جامعة الرانري
AR-RANIRY

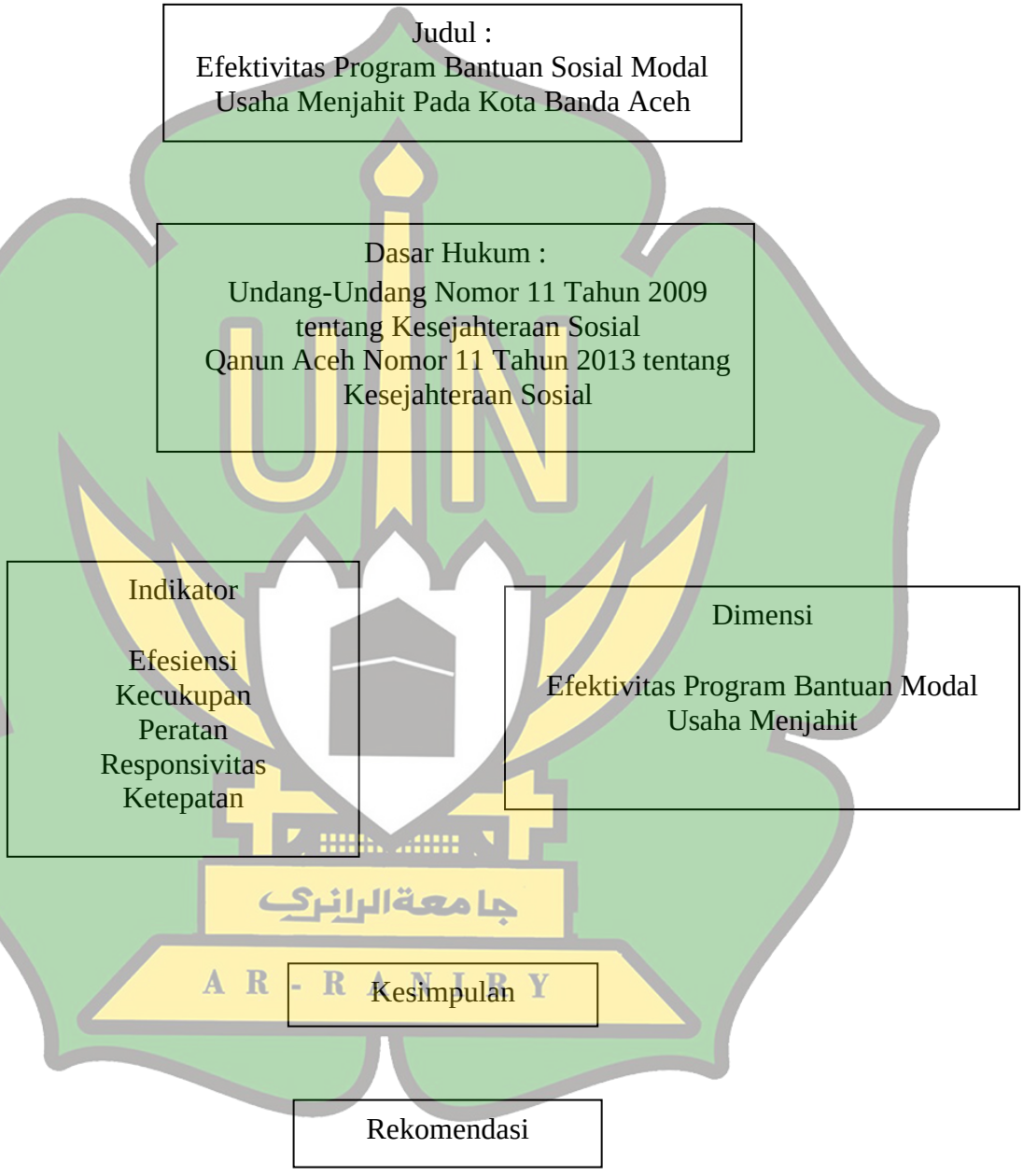
preferensi, atau nilai-nilai dari kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat[23].

2.2.5. Ketepatan

Ketepatan adalah kemampuan untuk memberikan informasi, tindakan atau hasil yang benar dan sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan dengan kata lain ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

[23] Agustinus Lejiu, Masjaya, and Bambang Irawan, "Evaluasi Kebijakan Pembangunan Transmigrasi Di Kabupaten Mahakam Ulu (Studi Pada Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu)," *Jurnal Administrative Reform* 2, no. 4 (2014): 515–26.

2.3 Kerangka Berpikir [4]



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui pengumpulan data deskriptif berupa kata-kata, perilaku, dan pandangan subjek penelitian[5][24]. penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan serta perilaku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa metode kualitatif memungkinkan peneliti memahami kondisi nyata di lapangan secara lebih komprehensif serta menggambarkan fakta-fakta berdasarkan perspektif narasumber secara alamiah.

3.2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan studi kasus, khususnya single case study[6], yang memungkinkan penelitian untuk fokus pada satu isu atau perhatian tertentu dan menggunakan beberapa kasus untuk menggambarkannya. Contohnya, penelitian ini fokus pada masalah modal usaha menjahit, baik dalam konteks program formal maupun informal [25].

3.3. Lokasi dan waktu penelitian

Peneliti memilih *Gampong* Lamglumpang dan Lamteh kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh sebagai lokasi pada penelitian ini. Alasan peneliti menetapkan

[24] Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya.

[25] B A B Iii and A Jenis Pendekatan, "Studi Kasus Journal," 2015, 47–55.

Gampong Lamglumpang dan Lamteh kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh sebagai fokus penelitian dikarenakan daerah ini merupakan salah satu daerah tingkat efektivitas bantuan modal usaha menjahit [7]untuk menciptaan lapangan kerja Industri dapat menjadi sumber baru bagi masyarakat Banda Aceh.

Modal usaha ini bisa membantu dalam merancang strategi untuk mendukung pengusaha lokal dan meningkatkan kesempatan kerja bagi penduduk setempat. Sehingga peneliti tertarik untuk mengambil daerah ini sebagai lokus penelitian.

Waktu pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait penelitian ini dilakukan selama 2 bulan terhitung mulai dari bulan juli, hingga agustus pada tahun 2024

3.4. Sumber data

Dalam konteks ini sumber data terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sekunder, yang menjadi faktor penentu penting dalam penelitian ini.

3.4.1. Data primer

Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh langsung dari objek penelitian dengan menggunakan instrumen khusus. Adapun bentuk data primer pada penelitian ini diantaranya yaitu:

a. Transkrip wawancara
b. Dokumentasi lapangan seperti foto.

3.4.2. Data sekunder

Sumber data sekunder yang dimanfaatkan dalam penelitian ini melibatkan jurnal, buku, data statistik lembaga maupun lembaga publik,

jurnal akademik, pendapat sumber, data/dokumen pemerintah, dan pendapat lain sesuai dengan penelitian.

3.4. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data melibatkan strategi penelitian yang peneliti terapkan untuk menghimpun informasi yang diperlukan dan relevan. Proses ini berlangsung dalam berbagai tahapan, antara lain:

3.4.1. Wawancara

Wawancara Tidak Terstruktur digunakan dalam penelitian ini sebagai teknik wawancara. Wawancara ini memiliki karakteristik tidak ada daftar pertanyaan tetap, percakapan mengalir bebas dan spontan, seperti obrolan biasa.

3.4.2. Observasi[8]

Observasi ialah aktivitas peneliti dalam mengamati fenomena dilapangan , yaitu mengamati secara langsung objek yang diteliti, yaitu mencatat peristiwa dan keadaan yang sebenarnya terjadi. Peneliti menggunakan alternatif saat observasi yaitu dengan metode observasi secara langsung maksudnya metode yang cara mengumpulkan datanya pengamatan langsung. Metode ini digunakan sebagai pengamatan langsung. Metode ini digunakan sebagai pengamatan terhadap objek penelitian khususnya pada fokus masalah yang diteliti[26].

[26] Mappasere, S. A., & Suyuti, N. (2019). Pengertian penelitian pendekatan kualitatif. *Metode Penelitian Sosial*, *33*, 1-10.

3.5. Informan Penelitian

Informan adalah individu yang dapat menyediakan data atau informasi kepada peneliti, informan yang dipilih harus mempunyai kompetensi yang diperlukan dan memahami pokok bahasan penelitian. Dalam penelitian ini teknik inklusi informan yang digunakan ialah *purposive sampling* yang memerlukan kehadiran informan kunci dan informan yang dianggap paham terhadap permasalahan pada penelitian ini. Informan kunci atau *key informan* adalah mereka yang dianggap memiliki pengetahuan mendalam mengenai efektivitas program bantuan modal usaha menjahit untuk mendapatkan akses kerja di Kota Banda Aceh. Sedangkan informan merupakan sumber informasi yang memberikan informasi pengetahuan sehingga peneliti dapat memperoleh data yang spesifik.

Tabel 3
Informan Penelitian

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Dinas Sosial Kota Banda Aceh	[9]1 orang
2	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin (Dayasos dan FM)	[10]1 orang
3	Kepala Seksi Identifikasi, Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Sosial Kota Banda Aceh	[11]1 orang
4	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Kota Banda Aceh	[12]1 orang
5	Penerima Bantuan Modal Usaha Menjahit di Gampong Lamglumpang dan Lamteh Kecamatan Ulee Kareng	3 orang

[13]JUMLAH	7 Orang

Sumber : Data diolah tahun 2025

3.6. Fokus Penelitian

Pendapat peneliti dan teori

Tabel 4
Dimensi dan Indikator Penelitian

No	Dimensi	Indikator	Sumber
1	Efektivitas	Efesiensi Kecukupan Perataan Respontivitas Ketepatan	Publik Kebijakan Versi William, & Dunn. Implementasi public policy by William Dunn: Analysis.

3.7. Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data adalah sesuatu yang kompleks dan terus berubah, sehingga tidak ada konsistensi yang tetap.

Mereka menyarankan penggunaan triangulasi data sebagai cara untuk mencapai keabsahan.

Triangulasi data, penggabungan berbagai data dan sumber yang ada, juga menggambarkan triangulasi data sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, menggunakan berbagai cara, dan pada berbagai waktu. Ada tiga jenis triangulasi: triangulasi sumber, teknik, dan waktu[27].

a. Triangulasi sumber dilakukan dengan memeriksa data dari berbagai sumber, seperti hasil wawancara, arsip, dan dokumen lainnya, untuk menguji kredibilitasnya.
b. Triangulasi teknik dilakukan dengan memeriksa data dari sumber yang sama menggunakan teknik yang berbeda. Misalnya, data yang diperoleh dari observasi juga diperiksa melalui wawancara.
c. Triangulasi waktu mempertimbangkan bagaimana waktu dapat mempengaruhi kredibilitas data. Mengumpulkan data pada waktu yang berbeda, seperti pagi dan sore, dengan berbagai teknik seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi, dapat membantu memastikan keabsahan data[28].[14]
d. Peneliti menggunakan trianggulasi sumber dengan memeriksa data dari berbagai sumber, seperti hasil wawancara, arsip, dan dokumen lainnya, untuk menguji kredibilitasnya.

[27] Umrati & Hengki Wijaya, "Analisa Data Kualitatif : Teori, Konsep Dalam Penelitian," *Sekolah Tinggi Teologia Jaffray*, no. August (2020): 106.

[28] SUSANTI, D. (2024). *STRATEGI KEPALA SEKOLAH DALAM UPAYA MENINGKATKAN PERAN GURU PADA PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER SISWA DI SMPN SATAP 2 MESUJI TIMUR PROVINSI LAMPUNG* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Metro)..."

AR-RANIRY

3.8. Teknik Analisis Data

Saat menganalisis data, peneliti melakukan langkah-langkah analisis berikut:

3.8.1. Pengumpulan data

Pengumpulan data melalui wawancara dengan partisipan penelitian, dan mengolah serta menganalisis transkrip wawancaranya.

3.8.2. Reduksi data

Proses reduksi data melibatkan kegiatan menguraikan dan mengambil hal penting saja untuk mengurangi data membantu peneliti mengumpulkan data.

3.8.3. Penyajian data

Data disajikan dalam bentuk tekstual, tanpa adanya tambahan-tambahan yang mungkin tidak sesuai dengan fakta yang ada.

3.8.4. Penarikan atau verifikasi kesimpulan

Data tentang efektivitas program bantuan modal usaha menjahit di Kota Banda Aceh akhirnya dikumpulkan dan dikaitkan dengan teori-teori pendukung.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Profil Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh merupakan ibu kota Provinsi Aceh yang terletak di ujung utara Pulau Sumatera sekaligus sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi provinsi, Kota Banda Aceh memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah. Secara administratif, kota ini terbagi menjadi 9 kecamatan dengan 90 gampong, mencakup wilayah yang cukup luas dengan beragam karakteristik sosial ekonomi masyarakat.

Adapun untuk kelejalan dari profil Kota Banda Aceh terdiri atas Jumlah Kecamatan, Jumlah Desa dan Jumlah penduduk sebagai berikut:

Tabel 4.1
Profil Kota Banda Aceh

NO	KECAMATAN	JUMLAH GAMPONG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	BAITURRAHMAN	10	16.307	16.199	32.506
2	KUTA ALAM	11	21.208	21.483	42.691
3	MEURAXA	15	13.668	13.422	27.090
4	SYIAH KUALA	12	16.981	17.266	34.247
5	LUENG BATA	9	12.837	12.865	25.702
6	KUTA RAJA	6	7.538	7.390	14.928
7	BANDA RAYA	10	13.20	13.407	26.607
8	JAYA BARU	8	13.578	13.579	27.157
9	ULEE KARENG	9	14.083	14.527	28.610
	JUMLAH	**90**	**129.400**	**130.138**	**259.538**

Tabel 4.1 : Profil Kota Banda Aceh
Sumber : Dinas Sosial Kota Banda Aceh Tahun 2025

Tabel 4.2
Kota Banda Aceh Berdasarkan Gampong Dan Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (Km^2)	Jumlah Gampong	Nama Gampong
1	Baiturrahman	455	10	1. Ateuk Jawo 2. Ateuk Deah Tanoh 3. Ateuk Pahlawan 4. Ateuk Munjen 5. Neusu Aceh 6. Seutui 7. Sukaramai 8. Neusu Jaya 9. Peuniti 10. Kampung Baru
2	Kuta Alam	1.005	11	1. Peunayong 2. Laksana 3. Keuramat 4. Kuta Alam 5. Beurawe 6. Kota Baru 7. Bandar Baru 8. Mulia 9. Lampulo 10. Lamdingin 11. Lambaro Skep
3	Meuraxa	726	16	1. Surien 2. Aso Nanggroe 3. Gampong Blang 4. Lamjabat 5. Gampong Baro 6. Punge Jurong 7. Lampaseh Aceh 8. Punge Ujong 9. Cot Lamkeuweuh 10. Gampong Pie 11. Ulee Lheue 12. Deah Glumpang 13. Lambung 14. Blang Oi 15. Alue Deah Teungoh 16. Deah Baro
4	Syiah Kuala	1.424	10	1. Ie Maseng Kaye Adang

جامعة الرانري
AR-RANIRY

				2. Gampong Pineung 3. Lamgugob 4. Kopelma Darussalam 5. Rukoh 6. Jeulingke 7. Tibang 8. Deah Raya 9. Aleu Naga 10. Peurada
5	Lueng Bata	534	9	1. Lamdom 2. Cot Masjid 3. Bathoh 4. Lueng Bata 5. Blang Cut 6. Lampaloh 7. Suka Damai 8. Panteriek 9. Lamseupeung
6	Kuta Raja	521	6	1. Lampaseh Kota 2. Merduati 3. Keudah 4. Peulanggahan 5. Gampong Jawa 6. Gampong Pande
7	Banda Raya	479	10	1. Lam Ara 2. Lampeuot 3. Mibo 4. Lhong Cut 5. Lhong Raya 6. Peunyerat 7. Lamlagang 8. Geuceu Komplek 9. Geuceu Inem 10. Geuceu Kayee Jato
8	Jaya Baru	378	9	1. Ulee Pata 2. Lamjamee 3. Lampoh Daya 4. Emperom 5. Geuceu Meunara 6. Lamteumen Barat 7. Lamteumen Timur 8. Bitai 9. Punge Blang Cut
9	Ulee Kareng	615	9	1. Pango Raya 2. Pango Deah 3. Ilie

جامعة الرانري
AR-RANIRY

				4. Lamteh 5. Lamglumpang 6. Ceurih 7. Ie Masen Ulee Kareng 8. Doi 9. Lambhuk
Jumlah	**9 Kecamatan**		**90 Gampong**	

Tabel 4.1 : Profil Kota Banda Aceh
Sumber : Dinas Sosial Kota Banda Aceh Tahun 2025

Kesembilan kecamatan tersebut meliputi Kecamatan Meuraxa, Jaya Baru, Banda Raya, Baiturrahman, Lueng Bata, Kuta Alam, Kuta Raja, Syiah Kuala, dan Ulee Kareng. Masing-masing kecamatan memiliki jumlah gampong yang bervariasi, dengan Kecamatan Meuraxa memiliki jumlah gampong terbanyak yaitu 16 gampong, sementara Kecamatan Kuta Raja hanya memiliki 6 gampong. Perbedaan jumlah gampong ini menjadi pertimbangan dalam distribusi program-program pemerintah, termasuk program bantuan sosial.

Sebagai ibu kota provinsi, Kota Banda Aceh menjadi pusat aktivitas ekonomi, pemerintahan, dan sosial budaya. Namun demikian, di balik kemajuan sebagai kota metropolitan, masih terdapat ada kemiskinan yang tersebar di berbagai gampong. Kondisi ini menjadikan program pemberdayaan sosial dan pengentasan kemiskinan sebagai prioritas pemerintah kota dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dalam perkembangan perkotaan sesuai dengan rtrw kota banda aceh maka digambarkan dalam sketsa sebagai berikut:

AR-RANIRY

Gambar 4.1
Denah Kota Banda Aceh dalam bingkai Provinsi Aceh



Gambar 4.1 : Profil Kota Banda Aceh
Sumber : Dinas Sosial Kota Banda Aceh Tahun 2025

4.1.2. Profil Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Dinas Sosial Kota Banda Aceh merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sosial. Dinas ini memiliki tugas pokok sesuai dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kota Banda Aceh yang dijabarkan dalam pasal 2 Peraturan wali Kota Banda Aeh Nomor 46 Tahun 2016 Tentang SOTK Dinas Sosial Kota Banda Aeh melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial, termasuk di dalamnya program pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin[29].

[29] "Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banda Aceh" 32, No. 3 (2021): 167–86.

Dalam perkembangan selanjutnya sebagaimana Struktur organisasi Dinas Sosial Kota Banda Aceh dipimpin oleh Kepala Dinas yang membawahi beberapa bidang strategis. Bidang-bidang tersebut antara lain Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin (Dayasos dan FM), Bidang Rehabilitasi Sosial, serta Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial. Setiap bidang memiliki tugas dan fungsi spesifik dalam melaksanakan program-program kesejahteraan sosial di Kota Banda Aceh.

Gambar 4.2
MAPP lokasi Dinas Sosial Kota Banda Aceh



Gambar 4.2 : MAPS Lokasi Dinas Sosial Kota Banda Aceh
Sumber : Dinas Sosial Kota Banda Aceh tahun 2025

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin memiliki peran sentral dalam pelaksanaan program bantuan modal usaha menjahit sehingga bidang ini bertanggung jawab dalam identifikasi calon penerima bantuan, verifikasi dan validasi data, penyaluran bantuan, hingga monitoring dan evaluasi program.

Dalam menjalankan tugasnya, bidang ini bekerja sama dengan pendamping di tingkat kecamatan yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan Dinas Sosial dalam menjangkau masyarakat di tingkat gampong.

Dinas Sosial Kota Banda Aceh juga berkoordinasi dengan Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Provinsi Aceh dalam pelaksanaan program-program bantuan sosial. Koordinasi ini penting mengingat kebijakan di tingkat kementerian dan provinsi dapat berbeda dengan kebijakan pemerintah daerah, sehingga diperlukan sinkronisasi agar program berjalan efektif dan tidak tumpang tindih dengan program dari tingkat pemerintahan lainnya.

4.1.3. Program Bantuan Modal Usaha Menjahit

Program bantuan modal usaha menjahit merupakan salah satu program pemberdayaan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat fakir miskin. Program ini memberikan bantuan berupa peralatan menjahit seperti mesin jahit serbaguna, mesin obras, dan peralatan pendukung lainnya kepada masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.

Pelaksanaan program ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagai landasan hukum utama. Di tingkat daerah, program ini juga berpedoman pada Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial yang memberikan kerangka kebijakan pelaksanaan program bantuan sosial di Provinsi Aceh, termasuk di Kota Banda Aceh.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Program bantuan modal usaha menjahit terakhir kali dilaksanakan secara rutin pada tahun 2023 dengan menggunakan dana OTSUS (Otonomi Khusus), bukan dari anggaran Pemerintah Kota Banda Aceh murni. Pada periode tersebut, program menyalurkan bantuan kepada 25 orang penerima manfaat yang tersebar di berbagai kecamatan. Sebelum masa pandemi Covid-19, program ini dilaksanakan setiap tahun dengan mekanisme yang lebih komprehensif, termasuk pelatihan keterampilan.

4.2. Hasil Penelitian

Hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas program bantuan modal usaha menjahit di Kota Banda Aceh. Analisis efektivitas program dilakukan dengan menggunakan kerangka teori efektivitas yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, khususnya teori efektivitas dari Steers dan Siagian yang dioperasionalkan melalui lima kriteria evaluasi kebijakan publik dari William N. Dunn, yaitu efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Steers, efektivitas dapat diukur melalui empat pendekatan utama: pencapaian tujuan (*goal attainment)*, pemanfaatan sumber daya sistem (*system resource*), proses internal (*internal process*), dan kepentingan strategis stakeholders (*strategic constituencies).* Dalam konteks evaluasi kebijakan publik, keempat pendekatan ini diterjemahkan ke dalam kriteria yang lebih operasional melalui kerangka evaluasi Dunn. Kriteria efisiensi berkaitan dengan pendekatan sumber daya sistem, kecukupan dan ketepatan terkait dengan pencapaian tujuan, perataan dan responsivitas berhubungan dengan kepentingan

جامعة الرانري
AR-RANIRY

strategis stakeholders, sementara keseluruhan kriteria mencerminkan kualitas proses internal program.

Data yang disajikan dalam bab ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang terdiri dari pejabat Dinas Sosial Kota Banda Aceh, pendamping program di tingkat kecamatan, dan penerima manfaat program. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder berupa dokumen program, laporan kegiatan, dan data administratif lainnya. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah setiap kriteria evaluasi berdasarkan temuan di lapangan, kemudian dilakukan pembahasan untuk memberikan penilaian terhadap tingkat efektivitas program secara keseluruhan. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif mengenai kinerja program dan menjadi dasar rekomendasi perbaikan di masa mendatang.

4.2.1 Analisis Efektivitas Program Bantuan Modal Usaha Menjahit Berdasarkan Kriteria Evaluasi Kebijakan Publik

Bagian ini menganalisis efektivitas program bantuan modal usaha menjahit di Kota Banda Aceh berdasarkan lima kriteria evaluasi kebijakan publik dari William N. Dunn. Kelima kriteria ini dipilih karena memberikan dimensi evaluasi yang komprehensif dan sejalan dengan teori efektivitas Steers dan Siagian yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Setiap kriteria akan dianalisis berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan untuk memberikan penilaian menyeluruh terhadap tingkat efektivitaPs program.

4.2.1.1. Efektivitas Program Bantuan Modal Usaha Menjahit[15]

Analisis efisiensi program bantuan modal usaha menjahit di Kota Banda Aceh dilakukan dengan mengevaluasi beberapa indikator utama, yaitu: (1) ketepatan dalam pemilihan penerima manfaat, (2) mekanisme dan proses distribusi bantuan, serta (3) perbandingan antara input program dan output yang diperoleh penerima manfaat. Ketiga indikator ini penting untuk mengukur sejauh mana sumber daya yang dialokasikan dapat memberikan hasil yang maksimal bagi penerima bantuan.Tingkat efektivitas pemanfaatan sumber daya dalam program dukungan permodalan untuk usaha jahit perlu ditelaah lebih lanjut. Kajian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana upaya yang dilakukan pemerintah setempat dapat memberikan hasil maksimal bagi warga yang menerima manfaat. Penilaian ini mempertimbangkan keterkaitan antara sumber daya yang digunakan, tahapan pelaksanaan, hasil langsung yang terlihat, serta manfaat jangka panjang bagi kemandirian usaha penerima dukungan. Hal ini penting karena efektivitas tidak semata diukur dari besaran anggaran, tetapi juga dari pengelolaan program dan kemampuan hasilnya meningkatkan taraf hidup warga yang membutuhkan.

Pelaksanaan program ini mengacu pada landasan hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial [30]. Di tingkat daerah, program ini juga berpedoman pada Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial yang memberikan kerangka kebijakan pelaksanaan program bantuan sosial di Provinsi Aceh, termasuk di Kota Banda

[30]) Undang-Undang Nomor, "Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial," 11ad.

Aceh [31]. Kerangka hukum ini memberikan legitimasi dan arah yang jelas bagi pelaksanaan program, sekaligus menjadi instrumen akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan pencapaian tujuan program.

Dengan demikian, sebagaimana kebijakan publik pada umumnya, pelaksanaan program bantuan modal usaha menjahit tidak terlepas dari berbagai tantangan dan dinamika kehidupan yang mempengaruhi efektivitas. pekerjaan pemberian modal usaha pemerintah kepada penerima manfaat, dengan sasaran perubahan kondisi

a. Efektivitas Sumber Daya (Anggaran dan Perlengkapan)

Dari sisi sumber daya, program ini dijalankan dengan anggaran yang cukup terbatas, terutama pada tahun 2023 yang menggunakan dana Otonomi Khusus. Keterbatasan ini berpengaruh pada jumlah warga yang dapat dijangkau, yakni sekitar 25 orang yang tersebar di beberapa kecamatan. Jumlah tersebut masih jauh dari cukup jika melihat banyaknya warga yang memiliki minat dan kemampuan dalam bidang jahit-menjahit. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya yang ada belum memungkinkan program menjangkau lebih banyak penerima. Selain itu, anggaran yang terbatas juga membatasi penyediaan dukungan lain seperti pelatihan, modal kerja, dan pendampingan lanjutan.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[31)] Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial

b. Efektivitas tahapan Pelaksanaan

Dari sisi pelaksanaan, program dapat berjalan dengan cukup efektif. Dinas Sosial Kota Banda Aceh melibatkan bidang terkait dan didukung pendamping di tingkat kecamatan dalam setiap tahapannya. Proses pendataan dan verifikasi calon penerima mengacu pada data kesejahteraan sosial terpadu, sehingga membantu memastikan bantuan tepat sasaran. Koordinasi ini mempermudah pelaksanaan di lapangan, mempercepat penyaluran, serta menghemat biaya dan waktu administrasi. Penyaluran bantuan dalam bentuk mesin jahit juga dinilai lebih efektif dibandingkan tunai, karena dapat mengurangi risiko penggunaan dana yang tidak sesuai tujuan dan memastikan bantuan dipakai untuk kegiatan produktif.

c. Efektivitas hasil langsung

Meski tahapan pelaksanaan berjalan efektif, hasil yang dicapai belum sepenuhnya sebanding dengan sumber daya yang telah dikeluarkan. Berdasarkan keterangan penerima, bantuan mesin jahit mampu mendorong mereka memulai atau kembali menggeluti usaha jahit dalam skala kecil. Sebagian penerima mulai mendapat pesanan dan tambahan penghasilan. Namun, peningkatan tersebut masih terbatas dan belum menunjukkan perubahan ekonomi yang berarti. Keterbatasan jaringan pelanggan, kurangnya kemampuan pemasaran, serta tidak adanya pendampingan lanjutan menyebabkan mesin jahit belum dimanfaatkan secara rutin. Akibatnya, hasil yang dicapai masih bersifat sementara.

d. Efektivitas manfaat jangka panjang

Dari sisi manfaat berkesinangbungan, efektivitas program ini masih perlu ditingkatkan. Hasil kajian menunjukkan hanya sebagian kecil penerima yang mampu menjaga usaha jahitnya tetap berjalan dan dijadikan sumber penghasilan tetap. Sebagian besar masih menjalankan usaha secara tidak rutin dan sangat bergantung pada pesanan dari lingkungan terdekat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sumber daya yang dialokasikan belum sepenuhnya menghasilkan dampak ekonomi yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan penerima. Rendahnya keberlanjutan usaha juga menegaskan bahwa efektivitas program tidak hanya ditentukan oleh pemberian alat, tetapi sangat dipengaruhi oleh dukungan lanjutan seperti pendampingan, pelatihan, dan akses ke pasar.

Secara keseluruhan, efektivitas program dukungan permodalan usaha jahit di Kota Banda Aceh belum mencapai tingkat optimal. Meski tahapan pelaksanaannya berjalan cukup efektif, keterbatasan sumber daya, hasil yang belum berkelanjutan, serta manfaat jangka panjang yang minimal membuat efektivitas program secara menyeluruh masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, upaya ke depan perlu diarahkan tidak hanya pada penyaluran bantuan, tetapi juga pada penguatan kemampuan usaha penerima agar sumber daya yang dialokasikan dapat memberikan manfaat yang lebih besar dan berkelanjutan.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

4.2.2.2 Efisiensi [16]

Efisiensi dalam konteks program bantuan modal usaha menjahit mengacu pada kemampuan program dalam mencapai tujuan dengan penggunaan sumber

daya yang minimal namun optimal. Menurut Dunn , efisiensi berkaitan dengan jumlah usaha yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat efektivitas tertentu. Dalam konteks teori Steers, kriteria efisiensi ini terkait erat dengan pendekatan sumber daya sistem (system resource approach), yang menekankan pada kemampuan program dalam memperoleh dan memanfaatkan sumber daya secara optimal

Dalam konteks program bantuan modal usaha untuk menjahit di Kota Banda Aceh, efisiensi dianalisis melalui beberapa indikator utama, yaitu ketepatan dalam pemilihan penerima manfaat, mekanisme dan proses distribusi bantuan, serta perbandingan antara input program dan hasil yang diperoleh oleh penerima manfaat.

Mengenai indikator ketepatan dalam pemilihan penerima manfaat, Dinas Sosial Kota Banda Aceh telah melakukan proses seleksi yang cermat untuk memastikan bahwa bantuan diberikan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkannya. Persyaratan utama untuk menerima bantuan adalah terdaftar sebagai keluarga miskin dalam Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memiliki proyek usaha menjahit yang masih dalam tahap awal. Memulai usaha dipahami sebagai situasi di mana calon penerima manfaat telah menunjukkan minat, keinginan, atau bahkan telah memulai usaha menjahit skala sangat kecil dengan peralatan terbatas. Tujuan dari kriteria ini adalah agar bantuan tidak diberikan kepada orang-orang yang tidak memiliki motivasi atau kemampuan untuk menjalankan usaha, melainkan kepada mereka yang memiliki potensi untuk mengembangkan usaha secara produktif.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Program Bantuan Usaha menjahit Banda Aceh menetapkan kriteria yang terstruktur dan terukur bagi penerima untuk memastikan program tersebut tepat sasaran.

Kriteria pertama adalah status ekonomi, yang mengharuskan calon penerima terdaftar dalam Sistem Data Jaminan Sosial Terpadu (DTKS) sebagai keluarga yang berisiko sejahtera atau miskin. Status ini diverifikasi menggunakan Nomor Identifikasi Penduduk (NIK) yang terdaftar dalam sistem DTKS nasional, untuk memastikan bahwa hanya individu yang terdaftar secara resmi sebagai penerima bantuan sosial yang dapat mengajukan permohonan.

Kriteria kedua adalah keberadaan usaha menjahit, yang secara khusus didefinisikan sebagai kondisi di mana calon penerima menunjukkan satu atau lebih dari hal-hal berikut: (1) memiliki keterampilan menjahit dasar, meskipun tanpa peralatan yang memadai; (2) telah menerima atau saat ini menerima pesanan jahit yang sangat kecil oleh masyarakat setempat; (3) memiliki tempat usaha atau area khusus di rumah yang dapat digunakan untuk kegiatan menjahit; atau (4) telah mengikuti pelatihan menjahit formal atau informal. Persyaratan usaha ini diverifikasi melalui kunjungan lapangan oleh tim pendukung kecamatan, yang menilai keseriusan niat dan kesiapan calon penerima.

Kriteria ketiga adalah keanggotaan dalam kelompok bisnis, di mana calon penerima harus bersedia membentuk atau bergabung dengan kelompok kerja yang terdiri dari setidaknya lima orang dengan bisnis serupa. Kelompok ini harus memiliki struktur organisasi yang sederhana dengan peran yang jelas, seperti ketua, sekretaris, dan bendahara. Tujuan pembentukan kelompok ini adalah untuk

جامعة الرانري
AR-RANIRY

memfasilitasi koordinasi program, menciptakan jaringan pemasaran bersama, dan sistem saling mendukung di antara peserta bisnis dalam memecahkan masalah operasional.

Kriteria keempat adalah komitmen terhadap pendampingan, yang mengharuskan calon penerima untuk bersedia berpartisipasi dalam seluruh program pendampingan setelah menerima bantuan. Program pendampingan ini meliputi: (1) pelatihan teknis tentang cara mengoperasikan mesin jahit selama minimal 10 hari kerja; (2) pelatihan manajemen bisnis dan akuntansi dasar; (3) kehadiran dalam pertemuan kelompok bisnis secara teratur setidaknya sekali sebulan; dan (4) kesediaan untuk menerima kunjungan pemantauan dari staf layanan sosial. Komitmen ini diuraikan dalam pernyataan berstempel yang ditandatangani oleh calon penerima sebelum distribusi.

Kriteria kelima adalah kepemilikan aset produktif yang terbatas. Calon penerima tidak boleh memiliki mesin jahit fungsional atau peralatan jahit lainnya yang nilainya lebih dari Rp 2 juta. Kriteria ini memastikan bahwa bantuan diberikan kepada mereka yang benar-benar kekurangan modal untuk memulai atau mengembangkan usaha, bukan kepada pengusaha yang sudah mapan. Verifikasi aset dilakukan melalui kunjungan pribadi ke rumah calon penerima dan wawancara dengan tetangga atau kepala asosiasi warga setempat (RT/RW).

Semua kriteria bersifat kumulatif, artinya calon penerima harus memenuhi semua persyaratan secara bersamaan agar disetujui untuk mendapatkan bantuan. Proses seleksi dilakukan menggunakan sistem poin, di mana setiap kriteria diberi bobot, dan pelamar dengan skor tertinggi mendapat prioritas jika jumlah aplikasi

جامعة الرانري
AR-RANIRY

melebihi kuota yang tersedia. Mekanisme ini memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam menentukan penerima bantuan keuangan untuk usaha garmen di Banda Aceh.

Dari sisi mekanisme penyaluran, Dinas Sosial telah menerapkan sistem yang cukup efisien dengan melibatkan pendamping di tingkat kecamatan sebagai perpanjangan tangan untuk menjangkau masyarakat di tingkat gampong. Distribusi bantuan juga mempertimbangkan pemerataan berdasarkan jumlah gampong di setiap kecamatan, sehingga setidaknya setiap gampong memiliki kesempatan untuk mendapatkan alokasi bantuan. Namun demikian, efisiensi program menghadapi tantangan serius dalam hal keberlanjutan usaha. Berdasarkan pengakuan informan dari Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, tingkat keberhasilan program sangat rendah. Ketika ditanya mengenai seberapa banyak penerima bantuan yang benar-benar berhasil mengembangkan usahanya,

Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan informan penelitian Kasubbag Program Bantuan Dinsos kota Banda Aceh menyebutkan sebagai berikut

> *"Kalau kita melihat keberhasilan programnya, kalau kita bilang misalnya 100 orang dalam 1 periode, 1 periode anggaran 100 orang yang betul-betul berhasil sampai dengan sekarang itu paling besar 20%.*

Demikian pula hasil observasi peneliti dilapangan dilokasi penjahitan *Gampong* Lamglumpang Kecamatan ulee Kareng menunjukkan menunjukkan bahwa :

Tabel 4.3
Observasi Lapangan Peneliti

No	Jenis Usaha Menjahit	Jenis Kain yang Digunakan	Produk yang Dijahit	Peralatan yang Digunakan
1	Jahit pakaian & seragam	Katun, polyester, kain seragam	Baju kurung, gamis, seragam sekolah, baju anak	Mesin jahit serbaguna, mesin obras (bantuan)
2	Jahit pakaian harian	Katun, jersey, kaos	Baju rumah, baju anak, rok	Mesin jahit serbaguna (bantuan)
3	Jahit & reparasi	Berbagai jenis kain	Perbaikan pakaian, memperkecil/membesarkan baju	Mesin jahit serbaguna (bantuan), peralatan manual

Sumber: Observasi Lapangan Peneliti, januari 2026

Berdasarkan analisis dokumen yang dilakukan, peneliti di lapangan menguraikan beberapa temuan utama terkait program bantuan modal usaha menjahit. Program ini bertujuan untuk membantu meningkatkan pendapatan masyarakat dengan memanfaatkan keahlian menjahit yang telah mereka miliki. Langkah ini diharapkan dapat membuka peluang ekonomi bagi warga yang memiliki keterampilan tersebut namun belum memiliki akses terhadap peralatan yang memadai.

Program ini juga mentargetkan warga yang membutuhkan dengan memberikan pendampingan yang menyeluruh. Pendampingan dilakukan secara bertahap hingga penerima bantuan dapat menguasai keterampilan menjahit pakaian jadi, bukan hanya sekadar perbaikan sederhana. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga dilengkapi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Mekanisme penyaluran bantuan modal usaha dilakukan berdasarkan permintaan yang datang dari perorangan atau kelompok kerja masyarakat yang dibentuk secara mandiri. Artinya, program ini berjalan dengan prinsip bottom-up, di mana inisiatif dan kebutuhan berasal dari masyarakat sendiri. Hal ini dimaksudkan agar bantuan yang disalurkan benar-benar sesuai dengan keinginan dan kondisi riil calon penerima, sekaligus mendorong partisipasi aktif dan rasa kepemilikan mereka terhadap program tersebut

Angka 20% menunjukkan bahwa dari setiap 100 penerima bantuan, hanya sekitar 20 orang yang mampu mempertahankan dan mengembangkan usahanya hingga saat ini. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun proses penyaluran bantuan telah dilakukan dengan baik, sebagian besar sumber daya yang dikeluarkan belum memberikan dampak jangka panjang yang signifikan.

Informan menjelaskan lebih lanjut bahwa keberhasilan usaha sangat bergantung pada kemampuan penerima dalam melakukan promosi dan menjaga kualitas pekerjaan:

> "Itu sangat tergantung sama dia promosi kan, kalau dia nggak promosi kan orang tidak pergi ke tempat dia. Habis itu kualitas kerja dia, kalau dia tidak rapi orang tidak pergi lagi kan[32]."

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemberian peralatan saja tidak cukup untuk menjamin keberhasilan usaha. Faktor-faktor lain seperti kemampuan pemasaran, kualitas hasil jahitan, dan keterampilan manajemen usaha ternyata memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberlanjutan usaha penerima bantuan.

[32] Ahmad Kamil, *Wawancara* (Banda Aceh, 6 Januari 2026

4.2.1.3. **Kecukupan**[17]

Menurut William N. Dunn , kecukupan mengacu pada sejauh mana pencapaian hasil yang diinginkan dapat memecahkan masalah yang ada. Dalam program bantuan modal usaha menjahit, Dinas Sosial melakukan verifikasi untuk mengetahui kebutuhan spesifik calon penerima, apakah memerlukan mesin jahit, mesin obras, atau peralatan lainnya.

Demikian pula, terdapat keterbatasan dalam kecukupan bantuan yang diberikan, sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Kasubbag program bantuan . pada Dinas Sosial Kota Banda Aceh menyebutkan sebagai berikut:

> "Sebelum pandemi kita ada pelatihan 20 hari, itu bagus sekali karena mereka diajari dari nol sampai bisa. Tapi sejak 2020 pelatihan dihilangkan karena anggaran habis untuk penanganan Covid. Sampai sekarang belum bisa kita aktifkan lagi[33]."

a. Bantuan yang diberikan hanya berupa peralatan, tanpa dana tambahan untuk membeli bahan baku. Hal ini menjadi hambatan bagi penerima bantuan yang belum memiliki pelanggan tetap atau tidak mampu mempromosikan usaha mereka secara efektif.

b. Sejak pandemi Covid-19, program pelatihan keterampilan yang sebelumnya berlangsung selama 20 hari sebelum bantuan didistribusikan, tidak lagi dilaksanakan secara teratur. Namun, pelatihan ini penting untuk memastikan bahwa penerima bantuan memiliki keterampilan yang cukup untuk mengoperasikan peralatan dan menjalankan usaha mereka.

[33] Ahmad Kamil, *Wawancara* (Banda Aceh, 6 Januari 2026

c. Tidak semua calon penerima bantuan dapat memperoleh bantuan sesuai spesifikasi yang diinginkan karena keterbatasan anggaran dan peraturan pengadaan yang mengharuskan jenis barang yang seragam. Hal ini seringkali mengakibatkan penerima bantuan tidak dapat memanfaatkan peralatan yang diberikan secara optimal.

Dari sisi jumlah penerima, kapasitas program juga masih terbatas. Dengan hanya sekitar 25 orang penerima pada tahun 2023, program ini belum mampu menjangkau seluruh masyarakat fakir miskin yang memiliki potensi untuk mengembangkan usaha menjahit di Kota Banda Aceh

Meskipun demikian, bagi penerima bantuan yang berhasil memanfaatkan peralatan dengan baik, bantuan ini cukup memadai untuk memulai usaha. Beberapa penerima bahkan mampu mengembangkan usahanya dengan menerima pesanan dari lingkungan sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa kecukupan bantuan sangat bergantung pada kemampuan penerima dalam mengelola usaha dan memasarkan produknya.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

4.2.1.4. Perataan[18]

Menurut William N. Dunn, kemampuan responsif menunjukkan sejauh mana kebijakan publik mampu merespons kebutuhan, harapan, dan masalah kelompok sasaran. Dalam studi ini, kemampuan responsif Program Bantuan Modal untuk Menjahit dianalisis melalui kesesuaian program dengan kebutuhan penerima

manfaat, respons penerima manfaat terhadap bantuan, dan respons pemerintah dalam pengawasan dan pemantauan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh, program bantuan modal usaha menjahit dirancang untuk merespons kebutuhan masyarakat miskin yang sudah memiliki usaha menjahit yang masih dalam tahap awal. Pemilihan penerima bantuan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan potensi usaha calon penerima, seperti yang dijelaskan oleh informan berikut:

> "Kalau di dunia sosial itu syarat utamanya fakir miskin, kedua mempunyai embrio usaha. Embrio usaha itu artinya dia sudah mulai menjahit sedikit-sedikit, mungkin masih pakai mesin manual atau belum punya pelanggan karena belum promosi[34]."

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa program ini telah berusaha menanggapi kondisi nyata komunitas sasaran dengan menetapkan kriteria seleksi yang tidak hanya berfokus pada kemiskinan, tetapi juga pada adanya potensi kewirausahaan yang dapat dikembangkan. Penekanan pada kepemilikan embrio usaha menjahit mencerminkan bahwa bantuan tidak diberikan secara seragam, melainkan disesuaikan dengan kesiapan dan kapasitas awal calon penerima manfaat. Dengan demikian, bantuan ditujukan kepada orang-orang yang sudah memiliki minat dan pengetahuan dasar tentang menjahit, tetapi menghadapi hambatan utama berupa kekurangan peralatan dan modal produksi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa program ini bukan sekadar amal, melainkan menekankan

[34] Ahmad Kamil, *Wawancara* (Banda Aceh, 6 Januari 2026

aspek pemberdayaan ekonomi, di mana peralatan yang disediakan diharapkan dapat berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan produktivitas, memperluas peluang bisnis, dan secara bertahap mendorong kemandirian ekonomi para penerima manfaat.

Demikian pula respon penerima terhadap program belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan hasil wawancara, tingkat keberhasilan program tergolong rendah, di mana hanya sebagian kecil penerima yang mampu mempertahankan dan mengembangkan usahanya secara berkelanjutan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh informan dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh sebagai berikut:

> "Kalau kita melihat keberhasilan programnya, kalau misalnya 100 orang dalam satu periode anggaran, yang betul-betul berhasil sampai sekarang itu paling besar 20%[35]."

Tingkat keberhasilan yang rendah menunjukkan bahwa, meskipun bantuan telah diberikan sesuai dengan kebutuhan awal para penerima manfaat, sebagian besar dari mereka belum mampu memanfaatkan sepenuhnya peluang usaha yang ada. Menurut analisis para peneliti, situasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya keterbatasan kemampuan promosi, kualitas produk yang rendah, dan kurangnya pendampingan berkelanjutan setelah pemberian bantuan. Penerima bantuan yang tidak secara aktif mempromosikan layanan mereka dan tidak menjaga

[35] Ahmad Kamil, *Wawancara* (Banda Aceh, 6 Januari 2026

kualitas pekerjaan mereka cenderung kehilangan pelanggan, sehingga bisnis mereka tidak dapat bertahan dalam jangka panjang.

Dari pihak pemerintah, Dinas Sosial Kota Banda Aceh telah melakukan upaya pemantauan dan evaluasi terhadap penerima bantuan. Namun, keterbatasan anggaran dan sumber daya telah menghalangi kegiatan pemantauan untuk dilakukan secara rutin dan intensif. Berdasarkan hasil analisis, ketika pemantauan dilakukan secara berkala, penerima bantuan menunjukkan motivasi yang lebih besar untuk melanjutkan bisnis mereka. Sebaliknya, kurangnya pengawasan dan pendampingan berkelanjutan menyebabkan beberapa penerima bantuan meninggalkan bisnis mereka atau tidak memanfaatkan bantuan secara optimal.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dari segi kapasitas respons, Program Bantuan Pembentukan Usaha Jahit di Kota Banda Aceh belum sepenuhnya optimal. Program ini dirancang sesuai dengan kebutuhan populasi sasaran, tetapi respons yang beragam dari para penerima manfaat dan keterbatasan respons pemerintah dalam hal bimbingan dan pengawasan membuat hasil program tidak optimal. Oleh karena itu, perlu meningkatkan kapasitas respons program melalui pendampingan berkelanjutan, pelatihan pemasaran, dan penguatan kualitas usaha, agar program dapat benar-benar merespons kebutuhan para penerima manfaat.

4.2.1.5. **Responsivitas**[19]

Menurut William N. Dunn ,responsivitas mengacu pada sejauh mana suatu kebijakan mampu memenuhi kebutuhan, preferensi, atau nilai-nilai kelompok

tertentu dalam masyarakat. Dalam program bantuan modal untuk menjahit, responsivitas diukur melalui kemampuan program untuk menanggapi kebutuhan nyata masyarakat miskin dan fleksibilitas program untuk menyesuaikan diri dengan kondisi penerima manfaat.

Sebagaimana disampaikan oleh Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Banda Aceh:

> "Memang lebih mudah kita mencari calon penerima menjahit daripada yang kayak bengkel, kayak gitu. Kalau misalnya, kalau orang provinsi kan karena seluruhnya tuh orang tuh harus buat pertanian, peternakan. Kalau kota-kota aja kan enggak, karena daerahnya enggak ada pertanian lainnya[36]."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa program telah responsif terhadap karakteristik geografis dan sosial ekonomi masyarakat Kota Banda Aceh. Program bantuan modal untuk menjahit menunjukkan tingkat responsivitas yang cukup baik dalam beberapa aspek. Pertama, pemilihan menjahit sebagai fokus utama program ini sesuai dengan kebutuhan pasar dan kemudahan dalam menemukan calon penerima manfaat. Menjahit dianggap lebih mudah dikembangkan di daerah perkotaan seperti Banda Aceh daripada pertanian atau peternakan, yang membutuhkan lahan yang luas. Selain itu, menjahit adalah keterampilan yang relatif mudah dipelajari dan dapat dilakukan dari rumah, sehingga cocok untuk berbagai kelompok masyarakat, termasuk ibu rumah tangga.

[36] Ahmad Kamil, *Wawancara* (Banda Aceh, 6 Januari 2026

Dinas Sosial Kota Banda Aceh juga menunjukkan responsivitasnya dalam proses verifikasi kebutuhan para penerima bantuan. Sebagaimana hasil wawancara dijelaskan:

> "Makanya kalau misalnya kita waktu verifikasi itu, kita tanya lagi, perlunya apa? Mesin jahit atau mesin obras? Atau misalnya dia punya mesin jahit tipe ini, kami akan memberi mesin jahitnya tipe ini, apakah siap? Kalau dia tidak bersedia, ternyata mesin jahitnya lebih tinggi speknya, dia kan tidak mau lagi."

Sebelum distribusi, para pejabat kembali mengkonfirmasi jenis peralatan yang dibutuhkan, baik itu mesin jahit, mesin merajut, atau peralatan lainnya. Proses ini memastikan bahwa bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan spesifik setiap penerima. Bahkan dalam beberapa kasus, jika spesifikasi peralatan yang akan diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan penerima, Dinas Sosial Banda Aceh memberi mereka pilihan untuk menerima atau menolak bantuan tersebut.

Program ini masih belum memenuhi kebutuhan modal kerja para penerima bantuan. Bantuan yang hanya berupa peralatan tanpa modal untuk membeli bahan baku menyulitkan beberapa penerima bantuan untuk memulai bisnis mereka. Mereka harus mencari sumber pendanaan lain untuk membeli kain, benang, dan bahan baku lainnya. Situasi ini menjadi hambatan, terutama bagi penerima bantuan yang berasal dari keluarga kurang mampu yang tidak memiliki akses ke modal tambahan.

Pemantauan dan evaluasi program, yang tidak dilakukan secara intensif dan berkelanjutan, menunjukkan kurangnya respons terhadap perkembangan bisnis penerima bantuan. Meskipun Dinas Sosial Kota Banda AcehSosial melakukan

جامعة الرانري
AR-RANIRY

pemantauan secara berkala, intensitasnya masih terbatas. Namun, pendampingan intensif, terutama selama tahun pertama setelah menerima bantuan, sangat penting untuk menjamin keberhasilan bisnis. Penerima bantuan memerlukan bimbingan dalam hal manajemen bisnis, pemasaran produk, dan pengembangan jaringan pelanggan.

Upaya Dinas Sosial untuk menerapkan perjanjian integritas sejak 2023 dan melibatkan BPK dalam pengawasan menunjukkan responsivitasnya terhadap masalah penjualan peralatan bantuan yang terjadi sebelumnya. Langkah ini merupakan respons terhadap evaluasi pelaksanaan program pada periode sebelumnya.

4.2.1.6. Ketepatan[20]

Ketepatan mengacu pada sejauh mana tujuan program sesuai dengan masalah yang ingin diselesaikan. Dalam program bantuan modal untuk menjahit ini, ketepatan dievaluasi berdasarkan apakah tujuan program sesuai untuk memerangi kemiskinan dan apakah implementasinya sesuai dengan kondisi di lapangan.

Tujuan program ini adalah memberdayakan masyarakat fakir miskin dengan memberikan peralatan menjahit agar mereka bisa membuka usaha sendiri. Tujuan ini memang relevan dengan masalah kemiskinan di Kota Banda Aceh. Program ini juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi produktif. Pemilihan usaha menjahit sebagai fokus program ternyata cukup tepat untuk wilayah perkotaan seperti Banda Aceh. Usaha menjahit tidak memerlukan lahan luas, bisa

dikerjakan dari rumah, dan memiliki prospek pasar yang baik karena kebutuhan akan pakaian dan produk tekstil yang terus ada di masyarakat.

Meskipun demikian, terdapat beberapa aspek ketepatan yang perlu dikritisi. Asumsi bahwa pemberian peralatan saja sudah cukup untuk memberdayakan masyarakat fakir miskin ternyata tidak sepenuhnya tepat. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan program hanya mencapai 20%, yang berarti 80% penerima bantuan tidak mampu mempertahankan dan mengembangkan usahanya. Selain itu, kriteria penerima bantuan ternyata belum cukup ketat dan masih ada celah untuk penyalahgunaan. Informan mengungkapkan kendala utama yang dihadapi:

> "Yang paling banyak itulah, mereka menutup informasinya, nggak kasih detail, dia tipu-tipu kita. Makanya kadang-kadang walaupun petugas lapangan sudah turun, kami orang dinas tetap turun...Atau jangan-jangan dia bilang, saya punya embrio usaha, rupanya dia sudah punya usaha besar, udah bisa sewa toko, kayak gitu. Itu kita tidak bisa kasih[37]."

Masalah ini menunjukkan bahwa kriteria yang didasarkan semata-mata pada Fakir dan embrio usaha tidak memadai. Kriteria tambahan, seperti motivasi yang tulus dan komitmen untuk menjalankan usaha, diperlukan. Karena kurangnya integritas dalam informasi yang disediakan oleh calon penerima, bantuan tidak sampai kepada mereka yang membutuhkannya secara tepat. Akibatnya, pembayaran dilakukan kepada individu yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria status pendapatan rendah dan memerlukan bantuan.

Fenomena penjualan peralatan bantuan juga menunjukkan ketidaktepatan dalam pengawasan program. Informan menjelaskan:

[37] Ahmad Kamil, *Wawancara* (Banda Aceh, 6 Januari 2026

> "Terus nanti dia akan dijual. Kalaupun dia mau, boleh. Nanti biar ada orang kerja. Adik saya, anak saya, keponakan saya. Tau-tau waktu kita monitoring, sekitar 6 bulan lagi udah dijual barangnya. Itu yang paling sering."

Fenomena penjualan peralatan ini sering terjadi setelah penyaluran bantuan. ituasi ini menunjukkan bahwa sebagian penerima bantuan kurang berkomitmen dalam menjalankan usaha atau menghadapi kesulitan keuangan mendesak, yang memaksa mereka untuk menjual peralatan guna memenuhi kebutuhan lain. Beberapa faktor yang menyebabkan penjualan peralatan tersebut meliputi spesifikasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan penerima, kekurangan modal kerja untuk membeli bahan baku, dan kurangnya keterampilan untuk mengoperasikan peralatan, tekanan ekonomi mendesak, dan motivasi yang rendah untuk menjalankan usaha. Meskipun perjanjian integritas telah berlaku sejak 2023 yang melarang penjualan peralatan dengan ancaman sanksi, akibat pengawasan yang terbatas, mekanisme ini tidak efektif dalam mencegah penjualan peralatan bantuan.

Pendekatan program yang bersifat *charity* (pemberian bantuan langsung) tanpa disertai sistem pendampingan dan pembinaan yang memadai kurang tepat untuk mencapai tujuan pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Pemberdayaan sejati memerlukan proses transformasi yang mengubah pola pikir, meningkatkan kapasitas, dan membangun kemandirian, bukan sekadar memberikan alat produksi. Selain itu, ketiadaan mekanisme evaluasi dampak jangka panjang membuat sulit untuk menilai apakah tujuan program benar-benar tercapai. Monitoring yang dilakukan masih sebatas memastikan bantuan diterima dan digunakan, namun belum mengukur secara sistematis dampak program terhadap peningkatan

pendapatan keluarga, pengurangan tingkat kemiskinan, atau penciptaan lapangan kerja baru.

Meskipun demikian, program ini tetap memiliki nilai strategis dan relevansi yang tinggi dalam konteks upaya pengentasan kemiskinan di Kota Banda Aceh. Dengan perbaikan pada aspek-aspek yang kurang tepat, terutama penambahan komponen pelatihan, pendampingan, dan modal kerja, program ini berpotensi memberikan dampak yang jauh lebih signifikan. Ketepatan tujuan program sudah baik, namun ketepatan dalam asumsi dan strategi pelaksanaan masih perlu disempurnakan agar hasil yang dicapai lebih optimal dan berkelanjutan

4.3. Pembahasan

[21]Berdasarkan analisis terhadap lima indikator efektivitas kebijakan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa efektivitas program bantuan modal usaha menjahit di Kota Banda Aceh berada pada tingkat yang masih perlu ditingkatkan secara signifikan. Kelima indikator menunjukkan hasil yang begitu beragam, dengan berbagai a aspek menunjukkan kinerja yang cukup baik namun sebagian besar masih menghadapi tantangan yang menghambat pencapaian tujuan program secara tepat.

Program ini menunjukkan kinerja yang kurang memuaskan dengan tingkat keberhasilan hanya mencapai 20% dari total penerima bantuan yang mampu mempertahankan dan mengembangkan usahanya hingga saat ini. Angka ini mengindikasikan bahwa 80% dari sumber daya yang dikeluarkan pemerintah belum memberikan dampak jangka panjang yang signifikan. Meskipun mekanisme penyaluran bantuan telah dilakukan dengan baik melalui sistem yang melibatkan

جامعة الرانري
AR-RANIRY

pendamping kecamatan dan mempertimbangkan pemerataan distribusi berdasarkan jumlah gampong, rendahnya tingkat keberhasilan ini menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan anggaran masih jauh dari optimal. Kondisi ini diperparah dengan adanya fenomena penjualan peralatan bantuan oleh sebagian penerima, yang mengindikasikan bahwa seleksi penerima dan mekanisme pengawasan masih perlu diperkuat.

Aspek kecukupan program juga menunjukkan keterbatasan yang cukup serius. Bantuan yang hanya berupa peralatan menjahit tanpa disertai modal kerja untuk membeli bahan baku menjadi kendala utama bagi penerima bantuan dalam memulai atau mengembangkan usaha mereka. Ketiadaan program pelatihan keterampilan yang sebelumnya dilaksanakan secara rutin selama 20 hari sebelum penyaluran bantuan, khususnya sejak masa pandemi Covid-19, semakin memperlemah kecukupan program dalam membekali penerima dengan kapasitas yang memadai. Jumlah penerima bantuan yang hanya sekitar 25 orang per tahun juga menunjukkan bahwa cakupan program masih sangat terbatas mengingat Kota Banda Aceh memiliki 90 gampong yang tersebar di 9 kecamatan dengan banyak masyarakat fakir miskin yang berpotensi mendapatkan manfaat dari program ini.

Dari aspek perataan, program telah menunjukkan upaya yang cukup baik dalam mendistribusikan bantuan secara adil dengan mempertimbangkan jumlah gampong di setiap kecamatan dan menargetkan masyarakat fakir miskin yang terdaftar dalam DTKS. Namun keterbatasan jumlah penerima dan tidak adanya mekanisme afirmatif untuk kelompok rentan tertentu seperti penyandang disabilitas atau perempuan kepala keluarga menunjukkan bahwa prinsip keadilan sosial belum

جامعة الرانري
AR-RANIRY

sepenuhnya terwujud. Proses identifikasi yang mengandalkan informasi dari pendamping kecamatan dan kepala gampong juga terkadang menimbulkan masalah transparansi ketika calon penerima tidak memberikan informasi yang akurat tentang kondisi mereka.

Responsivitas program menunjukkan hasil yang cukup beragam. Di satu sisi, pemilihan usaha menjahit sebagai fokus program dan proses verifikasi kebutuhan spesifik penerima menunjukkan responsivitas yang baik terhadap kondisi lokal dan kebutuhan masyarakat. Keterlibatan pendamping kecamatan dan koordinasi dengan kepala gampong juga menunjukkan upaya program untuk responsif terhadap dinamika di tingkat bawah. Namun di sisi lain, ketiadaan program pelatihan, tidak tersedianya modal kerja, monitoring yang kurang intensif, dan tidak adanya mekanisme feedback yang efektif menunjukkan bahwa program belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan komprehensif penerima bantuan untuk dapat mengembangkan usaha secara berkelanjutan.

Ketepatan tujuan program sebenarnya sudah sangat baik dan relevan dengan permasalahan kemiskinan yang ingin diatasi. Pemberdayaan ekonomi melalui pengembangan usaha produktif merupakan strategi yang tepat untuk mengatasi kemiskinan secara struktural. Pemilihan usaha menjahit juga tepat mengingat karakteristik wilayah perkotaan Banda Aceh dan prospek pasar yang baik. Namun ketepatan dalam hal asumsi dan strategi pelaksanaan program masih perlu diperbaiki. Asumsi bahwa pemberian peralatan saja sudah cukup untuk memberdayakan masyarakat fakir miskin terbukti tidak tepat, mengingat rendahnya tingkat keberhasilan program. Pendekatan yang lebih bersifat charity tanpa disertai

جامعة الرانري
AR-RANIRY

sistem pendampingan dan pembinaan yang memadai juga kurang tepat untuk mencapai tujuan pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, meskipun program bantuan modal usaha menjahit memiliki landasan kebijakan yang kuat, tujuan yang tepat, dan mekanisme penyaluran yang cukup baik, efektivitas program masih terhambat oleh berbagai faktor yang saling terkait. Rendahnya tingkat keberhasilan 20% menunjukkan bahwa program ini belum mampu memberikan dampak transformatif yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat fakir miskin di Kota Banda Aceh.

Untuk memahami posisi penelitian ini dalam konteks yang lebih luas, perlu dilakukan perbandingan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki fokus serupa. Perbandingan ini penting untuk melihat apakah temuan penelitian ini sejalan atau berbeda dengan penelitian lain, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang membedakan keberhasilan atau kegagalan program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin melalui usaha menjahit. Berikut disajikan tabel perbandingan antara hasil penelitian ini dengan lima penelitian terdahulu yang telah diuraikan pada Bab I.

Tabel 4.4
Perbandingan Hasil Penelitian dengan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti & Tahun	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian Ini	Persamaan	Perbedaan
1	Palupi Lindiasari Samputra (2017)	Efektivitas bantuan sosial (JKN-PBI, Rastra, PKH) dalam penanggulangan	Program bantuan sosial memiliki pengaruh terhadap penurunan jumlah	Tingkat keberhasilan program bantuan modal usaha menjahit hanya 20% di	Sama-sama meneliti efektivitas program bantuan sosial.	Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kuantitatif skala nasional,

		kemiskinan di Indonesia	penduduk miskin secara nasional.	Kota Banda Aceh.		penelitian ini kualitatif di tingkat daerah dengan fokus satu jenis bantuan.
2	Auriza Musfirahwaty dan Wahyuni Sakka (2024)	Pendampingan manajemen usaha penjahit Ikayani di Watang Pulu, Sidrap	Pendampingan manajemen usaha efektif meningkatkan efisiensi operasional UMKM yang sudah eksis.	Ketiadaan pendampingan menjadi faktor penghambat keberhasilan program, hanya 20% yang bertahan.	Sama-sama fokus pada usaha menjahit.	Penelitian terdahulu pada UMKM yang sudah berjalan dengan pendampingan intensif, penelitian ini pada penerima bantuan baru tanpa pendampingan memadai.
3	Aceng Ibrahim dan Ratna Dewi (2023)	Pemberdayaan masyarakat melalui PKBM untuk meningkatkan keterampilan masyarakat miskin	PKBM Raharja berhasil meningkatkan keterampilan masyarakat miskin melalui berbagai program pelatihan (menjahit, memasak, komputer).	Program bantuan modal usaha menjahit tidak disertai pelatihan sejak pandemi, menyebabkan rendahnya kecukupan program.	Sama-sama menargetkan masyarakat miskin untuk pemberdayaan ekonomi.	Penelitian terdahulu melibatkan pelatihan komprehensif, penelitian ini hanya pemberian peralatan tanpa pelatihan.
4	Nurul Fadhillah dan Fitriana (2021)	Efektivitas pelatihan menjahit bordir Dekranasda Kota Banda	Pelatihan menjahit bordir efektif meningkatkan ekonomi keluarga di	Program bantuan peralatan tanpa pelatihan menghasilkan tingkat	Sama-sama di Kota Banda Aceh pada sektor usaha menjahit.	Penelitian terdahulu fokus pada efektivitas pelatihan, penelitian ini pada

		Aceh di masa pandemi	masa pandemi dengan 5 responden berhasil membuka usaha.	keberhasilan rendah (20%).		bantuan modal tanpa pelatihan.
5	Uliatun Hasanah (2022)	Pelatihan kewirausahaan keterampilan menjahit bagi ibu-ibu PKK di desa-desa Lhokseumawe	Pelatihan kewirausahaan menjahit diterima dengan baik dan meningkatkan antusiasme ibu-ibu PKK.	Penerima bantuan kesulitan mengembangkan usaha karena kurangnya keterampilan manajerial dan pemasaran.	Sama-sama melibatkan pemberdayaan melalui keterampilan menjahit.	Penelitian terdahulu pada pelatihan untuk ibu-ibu PKK, penelitian ini pada bantuan peralatan untuk masyarakat fakir miskin.

Sumber: Data diolah peneliti, 2026



Gambar 4.4
Saat Wawancara dengan informan

Hasil penelitian mengenai efektivitas program bantuan modal usaha menjahit di Kota Banda Aceh memberikan beberapa implikasi penting, baik dari sisi teori maupun praktik. Implikasi ini tidak hanya berlaku untuk program bantuan usaha menjahit, tetapi juga dapat menjadi pembelajaran bagi program pemberdayaan ekonomi masyarakat fakir miskin lainnya yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

a. Implikasi Teoritis

Secara teoritis, temuan penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian efektivitas kebijakan publik, khususnya dalam konteks program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di Indonesia. Penelitian ini mendukung teori efektivitas kebijakan publik yang dikemukakan oleh William N. Dunn, dengan menunjukkan bahwa lima indikator efektivitas, yaitu efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan, masih relevan digunakan untuk menilai efektivitas program pemberdayaan ekonomi di tingkat daerah. Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa kelima indikator tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam menentukan keberhasilan suatu program. Efisiensi program, misalnya, tidak hanya ditentukan oleh kelancaran proses penyaluran bantuan, tetapi juga oleh sejauh mana program tersebut mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi penerima bantuan.Temuan bahwa tingkat keberhasilan program hanya sebesar 20% meskipun mekanisme pelaksanaan sudah berjalan cukup baik menunjukkan bahwa efisiensi tidak dapat hanya dilihat dari sisi administratif. Efisiensi dalam program pemberdayaan ekonomi seharusnya diukur dari dampak yang dihasilkan, terutama

perubahan kondisi ekonomi penerima bantuan secara berkelanjutan. Dengan demikian, efisiensi yang sesungguhnya bukan hanya tercapainya target penyaluran bantuan, tetapi juga kemampuan program dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sasaran.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa keterbatasan kecukupan program, yang hanya memberikan bantuan peralatan tanpa diikuti pelatihan, modal kerja, dan pendampingan, menjadi salah satu penyebab rendahnya keberhasilan program. Temuan ini menegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan pendekatan yang menyeluruh. Pemberdayaan ekonomi yang efektif harus mencakup aspek material, peningkatan keterampilan dan pengetahuan, serta dukungan berkelanjutan melalui pendampingan.

Temuan penelitian ini juga memperkaya pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Faktor seperti keterampilan, ketersediaan modal kerja, kemampuan pemasaran, pendampingan berkelanjutan, dan motivasi berwirausaha terbukti sangat berpengaruh. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multidimensi, sehingga upaya pemberdayaan ekonomi juga harus dirancang secara menyeluruh.

Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literatur mengenai program bantuan sosial di Indonesia, khususnya di daerah dengan karakteristik khusus seperti Aceh yang memiliki kerangka hukum dan sumber pendanaan

tersendiri. Penelitian ini menunjukkan bahwa konteks kelembagaan daerah dan kondisi eksternal, seperti pandemi Covid-19, sangat mempengaruhi keberlanjutan dan efektivitas program pemberdayaan ekonomi.

b. Implikasi Praktis

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program bantuan modal usaha menjahit di Kota Banda Aceh perlu diperbaiki melalui pendekatan yang lebih menyeluruh dan terintegrasi. Program pemberdayaan ekonomi tidak seharusnya hanya berfokus pada pemberian peralatan, tetapi juga harus dilengkapi dengan pelatihan keterampilan, penyediaan modal kerja awal, serta pendampingan yang berkelanjutan. Pelatihan yang diberikan tidak hanya berkaitan dengan keterampilan teknis menjahit, tetapi juga mencakup kemampuan dasar dalam mengelola usaha, seperti pencatatan keuangan sederhana, pengelolaan bahan baku, penentuan harga, dan strategi pemasaran.

Rendahnya tingkat keberhasilan program juga mengindikasikan perlunya perbaikan dalam mekanisme seleksi penerima bantuan dan sistem monitoring program. Seleksi penerima tidak cukup hanya berdasarkan status fakir miskin dan kepemilikan embrio usaha, tetapi juga perlu mempertimbangkan aspek motivasi, komitmen berwirausaha, keterampilan dasar yang dimiliki, serta potensi pasar di lingkungan penerima bantuan. Di samping itu, pengawasan terhadap pemanfaatan bantuan perlu diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan, seperti penjualan peralatan bantuan. Monitoring yang lebih intensif, baik melalui kunjungan lapangan maupun pemanfaatan teknologi pelaporan sederhana, perlu disertai dengan

جامعة الرانري
AR-RANIRY

penerapan sanksi yang tegas dan konsisten bagi penerima yang melanggar ketentuan. Pengawasan ini juga dapat melibatkan masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial agar pelaksanaan program berjalan lebih transparan dan akuntabel.

Selain aspek internal program, temuan penelitian ini juga menunjukkan pentingnya dukungan eksternal dalam meningkatkan keberhasilan usaha penerima bantuan. Akses pasar perlu difasilitasi melalui kerja sama dengan instansi lain, pembentukan kelompok usaha atau koperasi, serta pelatihan pemasaran, termasuk pemasaran digital. Keterbatasan anggaran pemerintah daerah juga mengharuskan adanya upaya diversifikasi sumber pendanaan melalui kerja sama dengan pihak swasta, lembaga donor, maupun lembaga keuangan mikro. Di sisi lain, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik di Dinas Sosial maupun pendamping kecamatan, menjadi hal yang penting agar proses pendampingan dan evaluasi program dapat berjalan secara optimal. Hasil evaluasi program juga perlu didokumentasikan dan dijadikan bahan pembelajaran, baik untuk perbaikan program di Kota Banda Aceh maupun sebagai referensi bagi daerah lain dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.

AR-RANIRY

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas program bantuan sosial modal usaha menjahit di Kota Banda Aceh, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program tersebut belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Program ini telah memberikan manfaat awal bagi sebagian penerima bantuan dalam memulai atau mengaktifkan kembali usaha menjahit, namun dampak jangka panjang yang dihasilkan masih terbatas. Rendahnya tingkat keberlanjutan usaha menunjukkan bahwa pemanfaatan bantuan belum mampu memberikan hasil yang sebanding dengan sumber daya yang telah dikeluarkan. Dari aspek efisiensi, mekanisme penyaluran bantuan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi capaian program belum maksimal. Dari aspek kecukupan, bantuan berupa peralatan menjahit belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan penerima karena tidak disertai dengan modal kerja, pelatihan keterampilan, serta pendampingan lanjutan. Sementara itu, dari aspek perataan, responsivitas, dan ketepatan, program telah memiliki tujuan yang relevan dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, namun masih memerlukan perbaikan dalam pelaksanaan agar dampaknya lebih efektif dan berkelanjutan.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa rekomendasi strategis dapat diajukan. disarankan agar pemerintah Kota Aceh, khususnya Dinas Sosial, melaksanakan program dukungan dan bimbingan berkelanjutan setelah distribusi bantuan. Perhatian terhadap bantuan pada tahap awal usaha dianggap vital untuk memastikan keberlanjutan dan optimalisasi kegiatan para penerima manfaat. perancangan program bantuan harus melampaui sekadar penyediaan alat. Pendekatan yang menyeluruh yang menggabungkan pelatihan teknis praktis, manajemen bisnis dasar, dan suntikan modal awal akan lebih efektif dalam memperkuat kapasitas keseluruhan penerima manfaat. proses seleksi penerima manfaat harus ditingkatkan. Proses ini harus lebih selektif, dengan mempertimbangkan tidak hanya kriteria administratif seperti status ekonomi dan kepemilikan usaha, tetapi juga motivasi, komitmen pribadi, dan kesiapan kewirausahaan. kerangka kerja pemantauan dan evaluasi program harus diperkuat. Mekanisme yang kuat, terstruktur, dan berkelanjutan akan memberikan data yang akurat tentang perkembangan usaha dan dampak program yang sebenarnya terhadap pengurangan kemiskinan, yang berguna untuk menentukan kebijakan di masa depan. sebagai rekomendasi untuk penelitian di masa depan, diperlukan studi dengan pendekatan metodologis yang beragam (seperti metode campuran) dan cakupan yang lebih luas untuk menganalisis efektivitas program-program pemberdayaan sosial secara lebih lengkap dan mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

Andini. "POTENSI USAHA PENJAHIT PAKAIAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA (STUDI PADA USAHA MENJAHIT DI 38B BANJAR REJO BATANGHARI LAMPUNG TIMUR)" 4, no. 02 (2024): 7823–30.

diskominfo.bandaacehkota. "Disnaker Serahkan Bantuan Mesin Jahit Untuk Dorong Kelompok Usaha Masyarakat Di Banda Aceh," n.d. https://diskominfo.bandaacehkota.go.id/2020/07/23/disnaker-serahkan-bantuan-mesin-jahit-untuk-mendorong-kelompok-usaha-masyarakat-di-banda-aceh/.

"Disnaker Serahkan Bantuan 44 Mesin Jahit Untuk Kelompok Usaha Di Banda Aceh," n.d.

Fadhillah, Nurul, and Rosmala Dewi. "EFEKTIVITAS PELATIHAN MENJAHIT BORDIR PADA DEKRANASDA KOTA BANDA ACEH UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI KELUARGA DI MASA PANDEMI." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kesejahteraan Keluarga* 7, no. 3 (2022): 11–18.

"Fadli, Muhammad Rijal. 'Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif.' Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum 21.1 (2021): 33-54." *Medan, Restu Printing Indonesia, Hal.57* 21, no. 1 (2008): 33–54. https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.

Fatmariyanti, Yanti, and Anis Fauzi. "Kebijakan Publik Versi William Dunn: Analisis Dan Implementasi." *Journal of Humanities and Social Studies* 1, no. 1 (2023): 1–9.

Frisnoiry, Suci, Harry M W Sihotang, Nazwah Indri, and Tiolina Munthe. "Analisis Permasalahan Pengangguran Di Indonesia." *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi* 17, no. 1 (2024): 366–75.

Gusmeri, M.t. "EFEKTIFITAS DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI KECAMATAN SYIAH KUALA KOTA

BANDA ACEHKERJASAMABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNANDAERAHDENGANFAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAMUNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRYTAHUN 2019LAPORANBAPPEDA," 2019.

Hasanah, Uliatun. "Pelatihan Kewirausahaan Keterampilan Menjahit Bagi Ibu-Ibu PKK." *PASAI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2022): 19–24.

Ibrahim, Aceng, Bachrun Rifa'i, and Ratna Dewi. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui PKBM Untuk Meningkatkan Keterampilan Masyarakat Miskin." *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 5, no. 4 (2023): 475–96. https://doi.org/10.15575/tamkin.v5i4.23925.

Ibrahim, Aceng, Bachrun Rifaâ, and Ratna Dewi. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui PKBM Untuk Meningkatkan Keterampilan Masyarakat Miskin." *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 5, no. 4 (2020).

Iii, B A B, and A Jenis Pendekatan. "Studi Kasus Journal," 2015, 47–55.

INDONESIA, PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK. "PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL." *Skripsi Universitas Negeri Malang* 39, no. 1 (2012): 1–15. http://dx.doi.org/10.1016/j.biochi.2015.03.025%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/nature10402%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/nature21059%0Ahttp://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/nrmicro2577%0Ahttp://.

Lejiu, Agustinus, Masjaya, and Bambang Irawan. "Evaluasi Kebijakan Pembangunan Transmigrasi Di Kabupaten Mahakam Ulu (Studi Pada Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu)." *Jurnal Administrative Reform* 2, no. 4 (2014): 515–26.

Manoppo, Ezra Viranny, and Nandika Aditya Laoh. “Strategi Pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dalam Penyaluran Bantuan Sosial RS-RTLH Oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara.” *Jurnal Konstituen* 4, no. 1 (2022): 25–39.

Musfirahwaty, Auriza, Wahyuni Sakka, and Sri Ramdayani. “Inovasi Dan Kreativitas: Pendampingan Manajemen Usaha Penjahit Ikayani Innovation and Creativity: Business Management Assistance for Ikayani Tailoring.” *CERGAS: Journal of Community Empowerment Research and Global Action Studies* 1, no. 1 (2025): 26–34.

Mustofa, Muhamad Fahrul, and Tris Utomo. “Standar Kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) Perspektif Dr. Wahbah Zuhaili.” *Wasathiyyah* 5, no. 1 (2023): 1–17.

Network, aceh journal national. “Dinsos Aceh Salurkan Modal Usaha Dampak Kenaikan Bbm.” *Aceh Journal Natonal Network*, September 2022.

“Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan,” n.d. https://dpmg.bandaacehkota.go.id/2010/10/20/program-percepatan-penanggulangan-kemiskinan/.

RIOS, Amanda. “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL D” 4, no. 2 (2009): 1–15. http://www.albayan.ae.

Samputra, Palupi Lindiasari, and Aji Wahyu Ramadhani. “Efektifitas Bantuan Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Tengah Perlambatan Ekonomi Indonesia Dengan Pendekatan Non-Parametrik.” *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec* 5, no. 1 (2019): 9–31.

Umrati & Hengki Wijaya. “Analisa Data Kualitatif : Teori, Konsep Dalam Penelitian.” *Sekolah Tinggi Teologia Jaffray*, no. August (2020): 106.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Andini. “POTENSI USAHA PENJAHIT PAKAIAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA (STUDI PADA USAHA MENJAHIT DI 38B BANJAR REJO BATANGHARI LAMPUNG TIMUR)” 4, no. 02 (2024): 7823–30.

diskominfo.bandaacehkota. “Disnaker Serahkan Bantuan Mesin Jahit Untuk Dorong Kelompok Usaha Masyarakat Di Banda Aceh,” n.d. https://diskominfo.bandaacehkota.go.id/2020/07/23/disnaker-serahkan-bantuan-mesin-jahit-untuk-mendorong-kelompok-usaha-masyarakat-di-banda-aceh/.

“Disnaker Serahkan Bantuan 44 Mesin Jahit Untuk Kelompok Usaha Di Banda Aceh,” n.d.

Fadhillah, Nurul, and Rosmala Dewi. “EFEKTIVITAS PELATIHAN MENJAHIT BORDIR PADA DEKRANASDA KOTA BANDA ACEH UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI KELUARGA DI MASA PANDEMI.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kesejahteraan Keluarga* 7, no. 3 (2022): 11–18.

“Fadli, Muhammad Rijal. ‘Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif.’ Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum 21.1 (2021): 33-54.” *Medan, Restu Printing Indonesia, Hal.57* 21, no. 1 (2008): 33–54. https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.

Fatmariyanti, Yanti, and Anis Fauzi. “Kebijakan Publik Versi William Dunn: Analisis Dan Implementasi.” *Journal of Humanities and Social Studies* 1, no. 1 (2023): 1–9.

Frisnoiry, Suci, Harry M W Sihotang, Nazwah Indri, and Tiolina Munthe. “Analisis Permasalahan Pengangguran Di Indonesia.” *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi* 17, no. 1 (2024): 366–75.

Gusmeri, M.t. “EFEKTIFITAS DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI KECAMATAN SYIAH KUALA KOTA BANDA ACEHKERJASAMABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNANDAERAHDENGANFAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

جامعة الرانري
AR-RANIRY

ISLAMUNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRYTAHUN 2019LAPORANBAPPEDA," 2019.

Hasanah, Uliatun. "Pelatihan Kewirausahaan Keterampilan Menjahit Bagi Ibu-Ibu PKK." *PASAI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2022): 19–24.

Ibrahim, Aceng, Bachrun Rifa'i, and Ratna Dewi. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui PKBM Untuk Meningkatkan Keterampilan Masyarakat Miskin." *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 5, no. 4 (2023): 475–96. https://doi.org/10.15575/tamkin.v5i4.23925.

Ibrahim, Aceng, Bachrun Rifaâ, and Ratna Dewi. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui PKBM Untuk Meningkatkan Keterampilan Masyarakat Miskin." *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 5, no. 4 (2020).

Iii, B A B, and A Jenis Pendekatan. "Studi Kasus Journal," 2015, 47–55.

INDONESIA, PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK. "PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL." *Skripsi Universitas Negeri Malang* 39, no. 1 (2012): 1–15. http://dx.doi.org/10.1016/j.biochi.2015.03.025%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/nature10402%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/nature21059%0Ahttp://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/nrmicro2577%0Ahttp://.

Lejiu, Agustinus, Masjaya, and Bambang Irawan. "Evaluasi Kebijakan Pembangunan Transmigrasi Di Kabupaten Mahakam Ulu (Studi Pada Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu)." *Jurnal Administrative Reform* 2, no. 4 (2014): 515–26.

Manoppo, Ezra Viranny, and Nandika Aditya Laoh. "Strategi Pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dalam Penyaluran Bantuan Sosial RS-

AR-RANIRY

RTLH Oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara." *Jurnal Konstituen* 4, no. 1 (2022): 25–39.

Musfirahwaty, Auriza, Wahyuni Sakka, and Sri Ramdayani. "Inovasi Dan Kreativitas: Pendampingan Manajemen Usaha Penjahit Ikayani Innovation and Creativity: Business Management Assistance for Ikayani Tailoring." *CERGAS: Journal of Community Empowerment Research and Global Action Studies* 1, no. 1 (2025): 26–34.

Mustofa, Muhamad Fahrul, and Tris Utomo. "Standar Kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) Perspektif Dr. Wahbah Zuhaili." *Wasathiyyah* 5, no. 1 (2023): 1–17.

Network, aceh journal national. "Dinsos Aceh Salurkan Modal Usaha Dampak Kenaikan Bbm." *Aceh Journal Natonal Network*, September 2022.

"Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan," n.d. https://dpmg.bandaacehkota.go.id/2010/10/20/program-percepatan-penanggulangan-kemiskinan/.

RIOS, Amanda. "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL D" 4, no. 2 (2009): 1–15. http://www.albayan.ae.

Samputra, Palupi Lindiasari, and Aji Wahyu Ramadhani. "Efektifitas Bantuan Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Tengah Perlambatan Ekonomi Indonesia Dengan Pendekatan Non-Parametrik." *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec* 5, no. 1 (2019): 9–31.

Umrati & Hengki Wijaya. "Analisa Data Kualitatif : Teori, Konsep Dalam Penelitian." *Sekolah Tinggi Teologia Jaffray*, no. August (2020): 106.

AR-RANIRY